

**DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK DI  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**WULANDARI**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Prodi Sejarah Dan Kebudayaan Islam  
Nim. 220501005



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026/1447 H**

**LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI (S-1)**

**DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK DI  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

**WULANDARI**

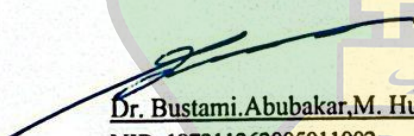
NIM: 220501005

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora  
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

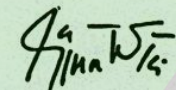
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Bustami Abubakar, M. Hum

NIP. 197211262005011002

  
Hamdina Wahyuni, M.Ag.

NIP. 198712202025212008

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

  
Ruhamah, M.Ag.

NIP. 197412242006042002

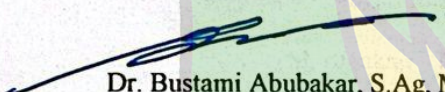
**DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK  
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

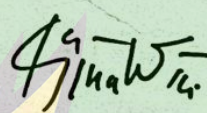
Telah Diuji Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dan di Nyatakan Lulus Serta diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu  
Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026  
Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

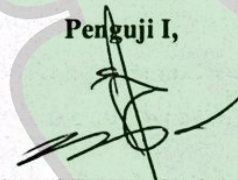
**Ketua**

  
Dr. Bustami Abubakar, S.Ag, M.Hum  
NIP: 197211262005011002

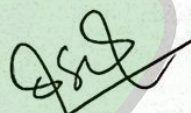
**Sekretaris**

  
Hamdina Wahyuni, S. Hum, S.Pd.I, M.Ag  
NIP: 198712202025212008

**Penguji I,**


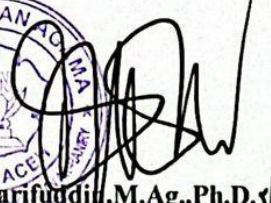
  
Ahmad Fauzan, M.Ag  
NIP: 197503192025211022

**Penguji II,**

  
Dr. Aslam Nur, M.A  
NIP: 196401251993031002

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh**

  
  
Svarifuddin, M.Ag., Ph.D.  
NIP:197001011997031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Wulandari
2. NIM : 220501005
3. Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
4. Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang ajukan kepada prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul :

**Dominasi Marga dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara**

Merupakan Hasil Karya Sendiri dan Bukan Plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang pencengahan dan pelanggaran di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 April 2026

Yang membuat pernyataan



## ABSTRAK

Nama : Wulandari  
Nim : 220501005  
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Judul : Dominasi Marga dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara  
Pembimbing I : Dr. Bustami Abubakar, M. Hum  
Pembimbing II : Hamdina Wahyuni, M.Ag

***Kata Kunci : Dominasi Marga, Ruang Aceh Tenggara***

Penelitian ini membahas tentang “Dominasi Marga dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara”. Dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat suku Alas. Dalam sistem ini, marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar pembentukan jaringan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dominasi marga dalam ruang publik, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik, serta mengetahui dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Fenomena ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan patrilineal masyarakat suku Alas yang menjadikan marga sebagai identitas sosial sekaligus basis kekuasaan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara terlihat dalam bidang politik, pemerintahan, dan struktur sosial masyarakat. Marga Desky, Beruh, dan Pinim memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam jabatan publik dan politik lokal.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Dominasi Marga Dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara”**. Shalawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah SAW, yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya, sehingga dapat merasakan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini:

1. Syarifuddin, M.Ag., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, para Wakil Dekan beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran skripsi;
2. Ruhamah, M.Ag. selaku ketua dan Hamdina Wahyuni, M.Ag Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Dr.Bustami.Abubakar, M.Hum. dan Hamdina Wahyuni, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Seluruh dosen-dosen Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah sabar dan mengajar serta memberikan ilmu selama empat tahun belakangan ini.
5. Teristimewah kepada keluarga tercinta yaitu ayahanda Ahmad, dan ibunda Suriati,dan abang Rifal Ade Putra, dan kakak Eva Sartika, dan adik Rafli, Nizam, yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat, motivasi, dan doa tanpa henti sepanjang proses penulisan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada sahabat saya, Rizka Amila Husni, Jumrah Aini, Karina Fadhila Dirja, Anggi Dirda Karah yang selalu mendampingi, memberikan dukungan, serta motivasi berharga selama proses penulisan skripsi ini.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mhd. Ray Kurniawan.M yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan semangat, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bentuk dukungan, kebersamaan dan dorongan yang sangat berarti hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Terakhir terimakasih yang tulus kepada diri sendiri, yang telah bertahan, belajar bangkit dari setiap keterjatuhan, serta mampu melewati berbagai rintangan dan tantangan hingga sampai pada tahap ini.

Segegap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam segi isi dan aspek penyajian skripsi ini, demi kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri karena tidak satu pun yang terjadi melainkan atas kehendak-Nya. Segala usaha telah penulis lakukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 13 Mei 2025

Penulis

**WULANDARI**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAH PEBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Masalah .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Pejelasan Istilah.....	11
1.6 Kajian Pustaka.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>20</b>
2.1 Dominasi Sosial.....	20
2.2 Sistem Keekerabatan Patrilineal dan Marga.....	25
2.3 Ruang Publik dan Politik Identitas .....	30
2.4 Dampak Dominasi Terhadap Inklusivitas Sosial .....	35
<b>BAB III : DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA .....</b>	<b>41</b>
3.1 Pola Dominasi Marga dalam Ruang Publik Politik di Kabupaten Aceh Tenggara .....	41
3.2 Faktor Dominasi Marga dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara .....	52
3.3 Dampak Dominasi Marga Terhadap Kehidupan Sosial dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.....	58
3.4 Analis Penulis.....	63
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

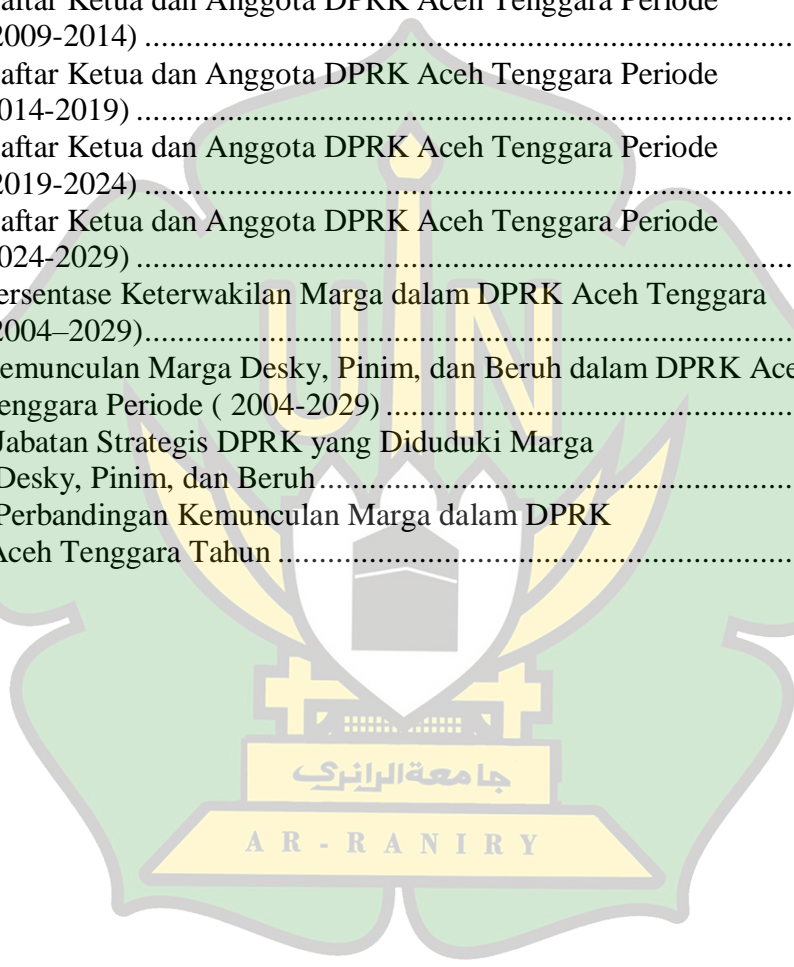
## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Keputusan
Lampiran II	: Surat Penelitian
Lampiran III	: Surat Balasan I
Lampiran IV	: Surat Balasan II
Lampiran V	: Surat Balasan III
Lampiran VI	: Daftar Informan
Lampiran VII	: Pertanyaan Wawancara
Lampiran VIII	: Dokumentasi Penulis dengan Informan
Lampiran IX	: Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR TABEL

3.1.1 Daftar 27 Marga di Aceh Tenggara .....	41
3.1.2 Data Kepemimpinan Kabupaten Aceh Tenggara .....	44
3.1.3 Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2004-2009) .....	47
3.1.4 Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2009-2014) .....	48
3.1.5 Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2014-2019) .....	49
3.1.6 Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2019-2024) .....	51
3.1.7 Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2024-2029) .....	52
3.1.8 Persentase Keterwakilan Marga dalam DPRK Aceh Tenggara (2004–2029).....	54
3.1.9 Kemunculan Marga Desky, Pinim, dan Beruh dalam DPRK Aceh Tenggara Periode ( 2004-2029) .....	57
3.1.10 Jabatan Strategis DPRK yang Diduduki Marga Desky, Pinim, dan Beruh .....	58
3.1.11 Perbandingan Kemunculan Marga dalam DPRK Aceh Tenggara Tahun .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Riwayat Bupati Aceh Tenggara .....42



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Aceh Tenggara yang sering disebut sebagai Tanah Alas, merupakan wilayah di Provinsi Aceh yang kaya akan warisan budaya adat masyarakat suku Alas. Suku Alas, sebagai kelompok etnis utama di daerah ini, memiliki sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, di mana marga menjadi elemen sentral dalam mengatur struktur sosial, budaya, dan politik.<sup>1</sup>Marga-marga utama suku Alas, seperti Bangko, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, serta marga pendatang seperti Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, dan lainnya (total mencapai sekitar 27 marga), tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai basis kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Fenomena dominasi marga tertentu dalam ruang publik seperti politik lokal, pemerintahan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi semakin menonjol, mencerminkan bagaimana sistem adat tradisional berinteraksi dengan dinamika demokrasi modern di Indonesia. Sejarah suku Alas menunjukkan bahwa marga telah menjadi fondasi identitas sosial sejak lama, dengan wilayah Tanah Alas yang terletak di dataran tinggi Bukit Barisan.<sup>3</sup>

Dominasi marga terlihat jelas melalui representasi dalam jabatan strategis. Armen Desky dari marga Desky menjabat sebagai Bupati Aceh Tenggara, diikuti

---

<sup>1</sup> <https://kutacaneku.blogspot.com/2011/01/sejarah-suku-alas-dan-marga-nya.html?m=1>. 2011.

<sup>2</sup> <https://lintasgayo.co/2014/08/02/di-alas-aceh-tenggara-ada-27-marga-aceh-dan-gayo-marga-baru/>. 2 Agustus 2014.

<sup>3</sup> <https://planetbatak.blogspot.com/2013/08/suku-batak-alas.html?m=1>.di di Akses 4 Agustus 2014.

oleh Raidin Pinim dari marga Pinim pada 2017–2022.<sup>456</sup> Setelah masa transisi dengan pelaksana harian seperti Gani Suhud dan M. Ridwan, pada tahun 2025, H.M. Salim Fakhry terpilih sebagai Bupati untuk periode 2025–2030, bersama Wakil Bupati Heri Al Hilal, yang turut menambah dimensi analisis tentang pergeseran atau kelanjutan dominasi marga.<sup>7</sup>

Pola ini menunjukkan bagaimana marga seperti Desky, Beruh dan Pinim memiliki pengaruh kuat dalam kontestasi politik, sering kali didukung oleh jaringan kekerabatan dan partai politik seperti Golkar atau Partai Aceh. Ruang publik, sebagaimana didefinisikan oleh Jürgen Habermas sebagai arena wacana rasional dan demokratis, di Aceh Tenggara tampaknya dipengaruhi oleh faktor identitas budaya. Dominasi marga tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga meluas ke akses ekonomi, pendidikan, dan fasilitas umum, di mana marga dominan sering kali mendapatkan prioritas.<sup>8</sup>

Selain Marga Desky dan Pinim, Beruh dominasi dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara juga melibatkan Marga-Marga besar lainnya, seperti Marga *Bangko*, *Keling*, *Kepale Dese*, *Selian*, dan beberapa Marga tua yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat Alas. Marga-marga tersebut tidak hanya memiliki jumlah anggota yang besar, tetapi juga mempunyai

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Bupati\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Aceh_Tenggara). 11 Maret 2025.

<sup>5</sup> <https://www.idezia.com/2024/09/Daftar.Bupati.Aceh.Tenggara.html?m=1>. 9 September 2024

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara). 16 September 2025.

<sup>7</sup> <https://id.scribd.com/document/863819099/Bupati-dan-Wakil-Bupati-Aceh-Tenggara>. 9 Januari 2025.

<sup>8</sup> Saradi Wantona, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf. “Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo”. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 1 (April 2018).

modal sosial, ekonomi, dan simbolik yang kuat, sehingga mampu memengaruhi distribusi kekuasaan dalam berbagai sektor kehidupan public.

Marga Beruh, misalnya, dikenal sebagai salah satu marga yang memiliki pengaruh signifikan dalam birokrasi pemerintahan, dunia pendidikan, serta struktur kelembagaan adat di Aceh Tenggara. Keberadaan tokoh-tokoh marga Beruh dalam jabatan strategis, baik sebagai pejabat pemerintahan, pimpinan lembaga pendidikan, maupun tokoh adat, menunjukkan bahwa pola dominasi marga tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat plural dan dinamis. Dominasi ini terbentuk melalui jaringan kekerabatan yang luas, relasi patron-klien, serta legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Fenomena serupa juga terlihat pada marga Bangko dan Keling, yang dalam beberapa periode turut memainkan peran penting dalam kontestasi politik lokal, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRK, keterlibatan tokoh-tokoh dari marga besar tersebut menunjukkan bahwa struktur marga menjadi salah satu faktor penentu dalam mobilisasi dukungan politik. Dukungan masyarakat terhadap calon pemimpin sering kali tidak hanya didasarkan pada program kerja atau kapasitas individu, tetapi juga pada pertimbangan identitas marga dan ikatan genealogis. Fenomena ini diperburuk oleh konteks pasca-MoU Helsinki 2005, yang membuka jalan bagi demokratisasi di Aceh, namun juga memperkuat politik identitas etnis dan kekerabatan.<sup>9</sup> Pasca-MoU, Aceh mengalami transformasi signifikan melalui

---

<sup>9</sup> Ovi Amalia Sari, Tabah Maryanah, & Robi Cahyadi. "Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". *Tafkirul Iqtishodiyah* : Vol. 2 No. 1 (2022)

Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, yang mengakomodasi pembentukan partai politik lokal seperti Partai Aceh (PA) dan memungkinkan eks kombatant GAM terlibat dalam proses politik damai. Di Aceh Tenggara, di mana suku Alas mendominasi populasi, politik identitas ini sering kali mengarah pada oligarki marga, di mana marga minor atau pendatang (seperti etnis Jawa atau Minangkabau) mengalami marginalisasi.<sup>10</sup>

Suku Alas mendominasi populasi, politik identitas ini sering kali mengarah pada oligarki marga, di mana marga minor atau pendatang (seperti etnis Jawa atau Minangkabau) mengalami marginalisasi<sup>11</sup> <sup>12</sup> Perubahan sosial selama dekade terakhir, termasuk pemekaran wilayah (seperti Kecamatan Lawe Alas dan Babul Makmur) dan perkembangan infrastruktur, turut membentuk dinamika ini. Namun, dominasi marga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, di mana akses terhadap ruang publik tidak merata, berpotensi menghambat pembangunan inklusif.<sup>13</sup>

Demokratisasi elektoral pasca-MoU, praktik politik identitas sering kali memanfaatkan sentimen etnis dan marga untuk menggalang dukungan, seperti dalam kontestasi urang Uken dan Toa di masyarakat Gayo Lut yang berdekatan,

---

<sup>10</sup> S. Wantona. "Praktik Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6, No. 1 (April 2018)

<sup>11</sup> Ovi Amalia Sari, Tabah Maryanah, & Robi Cahyadi. "Politik Identitas Etnis dan Agama Partai Aceh dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". *Tafkirul Iqtishodiyah* : Vol. 2 No. 1 (2022)

<sup>12</sup> <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/08/26/mengulik-keunikan-suku-alas-di-aceh-orang-yang-tinggal-di-atas-tikar>. 26 Agustus 2024.

<sup>13</sup> Riza Rahman. "Peran Partai Politik Lokal Aceh dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* (PDP). Universitas Indo Global Mandiri. Vol. 3, No. 2 (2024).

atau pengaruh partai lokal dalam mewujudkan kebijakan daerah.<sup>14</sup> Selain itu, pembangunan pasca-konflik di Aceh, termasuk di Aceh Tenggara, telah dipengaruhi oleh transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi aktor politik, yang membawa pendidikan politik bagi bekas kombatan untuk berpartisipasi di parlemen tanpa senjata.<sup>15</sup>

Fenomena dominasi marga dalam ruang publik Aceh Tenggara penting dikaji karena menyangkut relasi kekuasaan, keadilan sosial, dan dinamika politik lokal pada masyarakat adat. Dalam konteks modern, ruang publik seharusnya menjadi arena terbuka, rasional, dan setara sebagaimana dikemukakan oleh Habermas. Namun, pada masyarakat dengan sistem sosial berbasis kekerabatan seperti suku Alas, akses terhadap jabatan publik, pelayanan pemerintah, hingga distribusi sumber daya sering kali tidak sepenuhnya setara, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan jaringan marga tertentu.

Dominasi marga dalam ruang publik Aceh Tenggara tidak dapat dipahami hanya sebagai persaingan antara dua marga besar, melainkan sebagai fenomena struktural yang melibatkan berbagai marga yang memiliki kekuatan sosial dan politik relatif berbeda. Pola ini menciptakan stratifikasi sosial berbasis marga, di mana marga-marga tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap jabatan

---

<sup>14</sup> Saradi Wantona, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaif. "The Political Practice of Identity in the Dynamics of Local Politics Gayo Society". *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6, No. 1 (April 2018): 59-77

<sup>15</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Linda Christanty, Mangadar Situmorang, Pius Prasetyo, Saiful Haq & Yulius Purwadi Hermawan. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara – Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*. (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010), hlm. 68-70

publik, sumber daya ekonomi, dan ruang pengambilan keputusan, sementara marga lain berada pada posisi yang lebih marginal.

Fenomena dominasi multipel ini juga menunjukkan bahwa ruang publik di Aceh Tenggara tidak sepenuhnya netral dan egaliter, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan yang bersumber dari struktur adat dan jaringan kekerabatan. Dalam konteks ini, ruang publik menjadi arena negosiasi antara tradisi dan modernitas, antara prinsip demokrasi formal dengan praktik sosial berbasis marga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa dominasi marga bukan sekadar fenomena politik sesaat, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang mengakar dalam sejarah masyarakat Alas.

Keberadaan marga-marga dominan seperti Desky, Pinim, Beruh, dan marga besar lainnya menunjukkan bahwa kekuasaan lokal di Aceh Tenggara bersifat oligarkis, di mana distribusi kekuasaan cenderung berputar di sekitar kelompok marga tertentu. Pola ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik, tetapi juga pada distribusi kesempatan sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang pada akhirnya membentuk ketimpangan struktural dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dominasi marga dapat menciptakan pola oligarki lokal, di mana keputusan-keputusan publik dipengaruhi oleh kepentingan marga dominan, bukan semata-mata kepentingan masyarakat umum. Jika tidak dikaji secara akademik, pola ini berpotensi mempertajam ketidaksetaraan, memunculkan eksklusi sosial, dan menghambat pemerintahan yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi

---

<sup>16</sup> Bob Sugeng Hadiwinata dkk., *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010), hlm. 68–70.

penting sebagai upaya memahami bagaimana adat, politik identitas, dan demokrasi lokal berinteraksi di Aceh Tenggara. Selain itu, masih minim penelitian akademik yang secara khusus menelaah dominan marga Alas dalam konteks ruang publik modern sehingga penelitian ini menawarkan kontribusi empiris dan teoretis bagi kajian antropologi politik Aceh.

Pemilihan marga Desky, Pinim dan Beruh sebagai fokus penelitian bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pertimbangan historis, sosial, dan politik yang kuat. Kedua marga ini memiliki rekam jejak dominan dalam kepemimpinan daerah Aceh Tenggara selama dua dekade terakhir. Hal ini terlihat dari kepemimpinan Armen Desky sebagai Bupati Aceh Tenggara pada periode 2012–2017, yang kemudian dilanjutkan oleh Raidin Pinim pada periode 2017–2022. Pola dua periode berturut-turut yang dikuasai oleh dua marga besar ini menunjukkan adanya kesinambungan kekuasaan yang tidak dapat dilepaskan dari kekuatan jaringan kekerabatan patrilineal suku Alas.

Selain itu, baik Desky maupun Pinim merupakan marga tua dan besar dalam struktur sosial Tanah Alas, sehingga secara adat memiliki posisi simbolik dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan sebagian marga lainnya. Jaringan kekerabatan yang luas menjadikan kedua marga ini memiliki modal sosial dan politik yang kuat untuk memobilisasi dukungan, baik pada masa pemilihan umum maupun saat penempatan posisi strategis di pemerintahan daerah.

Kekuatan modal ini juga berdampak pada akses yang lebih besar terhadap sumber daya publik, proyek pembangunan, dan jabatan administratif. Lebih jauh, dalam dinamika politik kontemporer Aceh Tenggara, kedua marga ini kerap

menjadi rujukan utama dalam wacana politik identitas lokal, baik dalam kontestasi pemilihan bupati, pemilihan anggota DPRK, maupun dalam distribusi posisi birokrasi. Dengan demikian, fokus penelitian terhadap marga Desky, Pinim Beruh sangat relevan karena keduanya secara representatif mencerminkan pola dominasi marga dalam ruang publik di Aceh Tenggara.

Penelitian mengenai dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam oleh peneliti sebelumnya. Kajian-kajian yang tersedia umumnya hanya berfokus pada aspek antropologis masyarakat Alas, seperti sistem kekerabatan patrilineal, aturan perkawinan eksogami, struktur adat, serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam komunitas tersebut. Selain itu, beberapa penelitian membahas perubahan sosial masyarakat Aceh pasca-MoU Helsinki 2005, termasuk dinamika politik identitas dan peran partai lokal seperti Partai Aceh, namun tidak secara spesifik menyoroti dominasi marga dalam konteks politik dan pemerintahan Aceh Tenggara.

Kajian mengenai hubungan etnis di wilayah Gayo, Alas dan Singkil juga hanya menyentuh aspek umum interaksi sosial, bukan pada persoalan distribusi kekuasaan berbasis marga. Hingga penelusuran literatur terbaru periode 2020–2024, belum ditemukan penelitian akademik yang secara fokus membahas bagaimana marga-marga tertentu seperti Desky, Pinim dan Beruh mendominasi jabatan politik, pemerintahan, dan ruang publik. Penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan pun hanya membahas politik identitas Aceh secara umum atau oligarki lokal di beberapa daerah pasca-konflik Indonesia tanpa menyentuh konteks suku Alas

secara spesifik. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan ilmiah (*research gap*) dengan memberikan analisis komprehensif mengenai pengaruh struktur marga terhadap distribusi kekuasaan di Aceh Tenggara. Hal ini menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi serta memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian antropologi politik dan studi identitas lokal di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengungkap pola penyebab, dan dampak dominasi marga, sekaligus memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintahan daerah yang lebih adil. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman antropologi politik di masyarakat adat Indonesia, khususnya di Aceh Tenggara.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana dampak dominasi marga terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Mengetahui dampak dominasi marga terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari penelitian ini:

1. Menambah kajian antropologi politik tentang peran marga dalam masyarakat patrilineal Indonesia, khususnya dalam konteks suku Alas di Aceh Tenggara. Memperkaya literatur tentang politik identitas di Aceh pasca-konflik, dengan fokus pada interaksi antara sistem adat dan demokrasi modern.<sup>17</sup> Memberikan kontribusi pada studi sosiologi politik lokal dengan mengeksplorasi hubungan antara kekerabatan dan distribusi kekuasaan di ruang publik.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Aceh Tenggara untuk merancang kebijakan inklusif, seperti kuota representasi bagi marga minor, guna mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan partisipasi publik yang lebih merata. Menyediakan data dan rekomendasi bagi tokoh adat dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial di antara marga-marga di Aceh Tenggara, mendorong dialog lintas-marga. Membantu organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang mempertimbangkan dinamika kekerabatan dalam

---

<sup>17</sup> Tony Fery Sanjaya Manurung, "Marga sebagai Kekuatan Politik": Studi Kasus Penabalan Marga Silaban dalam Politik di Desa Silaban Do. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm 45.

pembangunan daerah. Menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan terkait dampak dominasi marga terhadap aspek ekonomi, pendidikan, dan akses infrastruktur di Kabupaten Aceh Tenggara.

### 1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kejelasan dalam penelitian ini, berikut adalah definisi istilah-istilah kunci yang digunakan secara operasional, berdasarkan konteks penelitian dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara:

#### 1. Dominasi

Penguasaan atau pengaruh yang signifikan oleh marga tertentu (seperti Desky, Pinim dan Beruh) terhadap akses dan pengambilan keputusan di ruang publik, diukur melalui representasi dalam jabatan politik (misalnya, bupati, wakil bupati, dan DPRD), distribusi sumber daya, serta mobilisasi dukungan politik berbasis kekerabatan patrilineal suku Alas. Dominasi ini tidak bersifat mutlak, tetapi terlihat dari pola berulang di mana marga dominan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan marga minor atau pendatang.<sup>18</sup>

#### 2. Marga

Sistem identitas kekerabatan patrilineal dalam masyarakat suku Alas, yang terdiri dari sekitar 27 kelompok keturunan (seperti Bangko, Desky, Pinim, Beruh, dll.), yang diturunkan melalui garis ayah dan berfungsi sebagai basis sosial, budaya, serta politik. Dalam penelitian ini, marga

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

dibedakan menjadi marga asli (seperti *Kepale Dese*) dan pendatang (seperti *Acih*), dengan fokus pada peran mereka dalam dinamika kekuasaan lokal.<sup>19</sup>

### 3. Ruang Publik

Arena interaksi sosial dan politik di luar ranah pribadi, seperti pemerintahan daerah, pemilihan umum, lembaga adat, pasar, dan fasilitas umum di Kabupaten Aceh Tenggara, di mana wacana dan akses terhadap kekuasaan terjadi. Mengadaptasi konsep Habermas, ruang publik di sini dipengaruhi oleh identitas budaya suku Alas, termasuk pengaruh marga dalam pengambilan keputusan publik.

### 4. Suku Alas

Kelompok etnis utama di Kabupaten Aceh Tenggara (Tanah Alas), dengan populasi mayoritas yang menganut sistem adat patrilineal dan nilai Islam, yang berinteraksi dengan etnis lain seperti Jawa atau Gayo. Dalam penelitian, suku Alas menjadi fokus sebagai konteks budaya di mana dominasi marga terjadi.

## 1.6 Kajian Pustaka

Penelitian yang di lakukan oleh Alfarisi, M.A. dkk (2025) dengan judul *Negotiating Customary Law and Fiqh Norms in Alas Ethnic Marriage System*<sup>20</sup>.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Alas memiliki sistem kekerabatan yang kuat berbasis marga (*mergo*), di mana aturan perkawinan harus

<sup>19</sup> T. Akbar. "Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas."(Banda Aceh 2004).hlm 15-25

<sup>20</sup> Alfarisi, Muhammad Adib., Raihan Putri, Dina Fadhila, Souad Ezzerouali. *Negotiating Customary Law and Fiqh Norms: The Transformation of the Mepahukh Tradition in the Indigenous Marriage Practices of the Alas People in Southeast Aceh*. Indonesian *Journal of Sharia and Socio-Legal Studies* : Vol. 1, No. 1, 2025, pp. 72-93. DOI: <https://doi.org/10.24260/ijssls.1.1.9>.

dilakukan antar-marga untuk menjaga identitas etnis dan struktur sosial masyarakat Alas. Sistem marga menjadi dasar dalam hubungan sosial, hukum adat, dan identitas kolektif masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Sama-sama mengkaji peran marga dalam struktur sosial masyarakat suku Alas dan menunjukkan bahwa marga bukan sekadar identitas keluarga, tetapi memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat. Perbedaannya yaitu penelitian Alfarisi dkk fokus pada hukum adat dan perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus pada dominasi marga dalam ruang publik dan politik lokal.

Kemudian, Penelitian tentang budaya dan struktur sosial suku Alas (2022) yang dilakukan oleh Hariyu Aflah dan Ella Andhany yang berjudul Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara.<sup>21</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa suku Alas memiliki kebudayaan yang khas dan sistem sosial yang kuat sebagai bagian dari identitas masyarakat Aceh Tenggara. Budaya dan struktur sosial masyarakat Alas menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari dan pola interaksi sosial. Persamaannya antara lain Sama-sama membahas masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara dan menguatkan fakta bahwa struktur sosial dan budaya Alas sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya ialah fokus penelitian pada aspek budaya dan pendidikan, bukan pada dominasi marga dalam ruang publik dan politik.

Kemudian penelitian terkait Kajian teoretis tentang struktur kekerabatan dan marga (2021) yang dilakukan oleh Kenji Itao & Kunihiro Kaneko yang

---

<sup>21</sup> Aflah, H., & Andhany, E. Etnomatematika dalam Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 2022. 2376-2390. <https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466> hlm 72-93

berjudul *Emergence of Kinship Structures and Descent Systems*. Penelitian ini menjelaskan bahwa struktur kekerabatan (clan/marga) terbentuk melalui interaksi sosial dan kompetisi antar kelompok keluarga. Sistem patrilineal muncul sebagai bentuk organisasi sosial yang menentukan pola kerja sama, kekuasaan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat adat.<sup>22</sup> Persamaannya yaitu Memberikan dasar teoretis bahwa marga dapat menjadi basis kekuasaan sosial dan politik serta relevan untuk menjelaskan dominasi marga dalam ruang publik. Sedangkan perbedaannya Bersifat global dan teoretis, bukan studi kasus Aceh Tenggara.

Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa identitas etnis, kekerabatan, dan jaringan sosial memiliki peran signifikan dalam struktur kekuasaan lokal di Aceh dan Indonesia. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji dominasi marga Alas dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengintegrasikan perspektif antropologi, politik lokal, dan studi identitas untuk menjelaskan pola dominasi marga dalam konteks masyarakat Alas.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Agar penulis mendapatkan informasi-informasi mengenai topik yang akan penulis bahas maka diperlukan beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

---

<sup>22</sup> Kenji Itao and Kunihiko Kaneko. *Emergence of Kinship Structures and Descent Systems: Multi-level Evolutionary Simulation and Empirical Data Analysis*. Research Center for Complex Systems Biology, University of Tokyo, Komaba 3-8-1, Tokyo 153-8902, 2021. Japan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, seperti dominasi marga dalam ruang publik, melalui pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan politik masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Metode deskriptif-analitis bertujuan untuk mendeskripsikan pola dominasi marga dan menganalisis faktor-faktor penyebab serta dampaknya, tanpa melakukan manipulasi variabel seperti pada penelitian kuantitatif.<sup>23</sup>

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, khususnya di kecamatan-kecamatan utama seperti Babel, Kutacane, Badar, dan Lawe Alas, yang merupakan pusat aktivitas masyarakat suku Alas dan ruang publik politik. Pemilihan lokasi ini karena Aceh Tenggara dikenal sebagai Tanah Alas, di mana sistem marga sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik. Waktu penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer pada periode 5 Desember 2025 hingga 27 Maret 2026.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan kunci, seperti tokoh adat suku Alas, pemimpin marga

---

<sup>23</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian *Kuantitatif, Kualitatif* dan R&D". (Bandung: CV Alfabeta, 2019), hlm 2.

(misalnya, dari marga Desky, Pinim dan Beruh), mantan pejabat pemerintahan (seperti mantan bupati), anggota DPRD, dan warga masyarakat dari marga minor. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan representasi yang relevan, dengan target 10–15 informan yang memiliki pengetahuan tentang dinamika marga dan ruang publik. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti arsip pemerintahan (daftar bupati, hasil pemilu), laporan partai politik (Golkar dan Partai Aceh), serta publikasi etnografi tentang suku Alas.<sup>24</sup>

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat dan mendalam. Untuk mendapatkan data yang relevan dan valid, peneliti melakukan tiga langkah sebagai berikut :

1. Observasi: Pengamatan langsung terhadap kegiatan ruang publik, seperti rapat adat, kampanye politik, dan sidang DPRD di Aceh Tenggara, untuk mengamati interaksi antar-marga dan pola

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157.

dominasi secara real-time. Observasi dilakukan selama 1–4 bulan untuk menangkap dinamika sehari-hari.

2. Wawancara: Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan 12 orang informan kunci untuk menggali perspektif terkait faktor budaya, khususnya sistem patrilineal, serta faktor politik seperti dukungan partai yang mendukung dominasi marga di ruang publik.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda), anggota DPRD, tokoh adat, dan masyarakat umum. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa para informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti.

Seluruh proses wawancara dilakukan dengan izin informan dan direkam guna menjaga keakuratan data. Hasil wawancara kemudian ditranskripsikan, dan apabila menggunakan bahasa Alas, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan proses analisis data.<sup>25</sup>

3. Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen seperti daftar bupati (misalnya, Armen Desky 2012–2017, Raidin Pinim 2017–2022, dan H.M. Salim Fakhry 2025–2030), hasil pemilu DPRD,

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

arsip adat suku Alas, dan laporan media lokal tentang politik identitas.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Langkah ini bertujuan untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori tertentu, menjabarkannya ke dalam unit-unit informasi, melakukan sintesis, menyusun pola-pola hubungan, serta memilih hal-hal yang penting untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama, yaitu:<sup>26</sup>

1. Reduksi Data: Penyederhanaan data mentah dengan memfokuskan pada tema relevan, seperti pola dominasi marga dalam jabatan bupati dan faktor penyebabnya. Data yang tidak relevan dibuang, sementara yang penting dikodekan berdasarkan kategori (misalnya, “dominasi politik marga Desky”).
2. Penyajian Data: Penyajian data dalam bentuk matriks, grafik, atau tabel, seperti timeline kepemimpinan marga atau matriks distribusi jabatan berdasarkan marga.

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 16.

3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan: Penarikan kesimpulan sementara yang diverifikasi melalui triangulasi dan perbandingan dengan teori (misalnya, teori elit Mills atau politik identitas). Kesimpulan akhir mencakup pola dominasi, dampak, dan rekomendasi.<sup>27</sup>

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disusun dalam sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Deskripsi tentang konteks masyarakat adat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, di mana marga (seperti Desky, Pinim, Beruh, dan lainnya) memainkan peran sentral dalam struktur sosial, budaya, dan potensial dominasi di ruang publik seperti politik, pemerintahan, dan ekonomi lokal. Penjelasan bagaimana sistem kekerabatan patrilineal suku Alas memengaruhi akses terhadap jabatan publik, berdasarkan sejarah suku Alas sebagai kelompok etnis utama di wilayah Tanah Alas.

**BAB II** Membahas konsep dominasi marga, ruang publik, dan perspektif sejarah serta kebudayaan Islam, dengan referensi terbaru sejak 2022.

**BAB III** Di dalamnya dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta informasi mengenai informan. Bab ini menunjukkan bagaimana proses penelitian dilakukan secara sistematis.

---

<sup>27</sup> Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 451.

**BAB IV** yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan. Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan di lapangan, sementara saran ditujukan bagi masyarakat, peneliti selanjutnya, atau pihak yang berkepentingan.



## BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

### 2.1 Dominasi Sosial

Dominasi sosial merujuk pada fenomena di mana satu kelompok atau individu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kelompok lainnya dalam suatu struktur sosial atau politik. Dominasi ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik dalam sistem pemerintahan, kekuasaan sosial, atau penguasaan terhadap sumber daya tertentu.<sup>28</sup> Dominasi sosial berperan penting dalam mengatur hubungan antar kelompok dalam masyarakat dan seringkali berhubungan dengan ketidaksetaraan yang ada dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

#### 2.1.1. Teori Dominasi Sosial

Secara teori, dominasi sosial dapat dilihat melalui lensa berbagai pemikir sosial yang telah mengkaji struktur kekuasaan dalam masyarakat. C. Wright Mills,<sup>29</sup> dalam teorinya tentang kekuasaan elit, menjelaskan bahwa dominasi sosial seringkali terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki akses terhadap sumber daya penting, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Mills menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, terdapat sekelompok kecil yang mengendalikan jalannya kehidupan sosial dan politik, yang ia sebut sebagai "*power elite*". Dalam konteks masyarakat Aceh Tenggara, dominasi marga, seperti marga Desky, Pinim dan Beruh bisa dilihat sebagai bentuk dari dominasi yang dilakukan oleh kelompok

---

<sup>28</sup> Wicaksono, P. "Dominasi sosial dan politik identitas di Indonesia". *Jurnal Sosiologi*, 14(3), 2006. 123-136.

<sup>29</sup> Mills, C. W. *The power elite*. (Oxford : Oxford University Press, 1956).

elit ini, di mana mereka memiliki kontrol terhadap akses ke kekuasaan politik dan ekonomi.

Teori dominasi sosial ini tidak hanya mencakup penguasaan terhadap sumber daya, tetapi juga bagaimana kelompok dominan membangun dan mempertahankan posisinya dalam struktur sosial. Pierre Bourdieu,<sup>30</sup> seorang sosiolog Prancis, mengemukakan konsep modal sosial dan modal simbolik sebagai sarana untuk memahami dominasi dalam masyarakat. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan mereka keuntungan sosial atau politik.<sup>31</sup> Sementara itu, modal simbolik berhubungan dengan status atau prestise yang diakui dalam masyarakat. Dalam hal ini, marga di Aceh Tenggara, seperti marga Desky, menggunakan modal sosial berupa hubungan kekerabatan yang kuat untuk mempertahankan dominasi mereka dalam ruang publik.

### **2.1.2. Dominasi Sosial dalam Konteks Marga**

Sistem marga di masyarakat suku Alas, yang berakar pada adat patrilineal, merupakan struktur sosial yang membedakan status dan akses individu berdasarkan kelompok keturunan atau marga mereka.<sup>32</sup> Dominasi sosial dalam masyarakat ini sering kali terlihat dalam bagaimana marga tertentu, yang memiliki pengaruh historis dan jaringan kekerabatan yang kuat, mengendalikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Hubungan kekerabatan yang erat

---

<sup>30</sup> Bourdieu, P. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. (USA : Harvard University Press, 1986).

<sup>31</sup> Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa. *Politik Islam di Persimpangan Jalan*. (Malang : CV. Azizah Publishing, 2019), hlm. 61.

<sup>32</sup> Said, A. “Politik identitas dan perubahan sosial di Aceh: Kasus Aceh Tenggara “. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 2018. 45-58.

dan pengaruh politik yang besar, seringkali mendominasi jabatan pemerintahan seperti bupati dan wakil bupati di Aceh Tenggara.

Sistem marga ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, dominasi marga mengarah pada oligarki marga, di mana hanya segelintir marga yang memiliki akses terhadap ruang publik dan kekuasaan politik, sementara marga minor atau pendatang seringkali terpinggirkan.<sup>33</sup> Hal ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, di mana kelompok yang dominan dapat mengontrol akses terhadap keputusan-keputusan penting yang memengaruhi seluruh masyarakat.

### 2.1.3 Dominasi Sosial dan Politik Identitas

Salah satu aspek penting dari dominasi sosial dalam konteks Aceh Tenggara adalah pengaruh politik identitas yang semakin kuat, terutama pasca-MoU Helsinki 2005. Politik identitas berbasis marga dan etnis ini menciptakan dinamika politik yang berbeda dari sistem politik di Indonesia secara umum.<sup>34</sup> Dalam masyarakat yang beragam seperti Aceh Tenggara, di mana marga-marga dominan memiliki kontrol atas sumber daya politik dan ekonomi, pengaruh identitas kekerabatan sering kali digunakan untuk menggalang dukungan dalam pemilu atau dalam pengambilan keputusan politik.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Rasyid, M. A. "Marga dan identitas sosial dalam masyarakat Aceh": Analisis antropologi politik. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 5(2), 2017. 55-70.

<sup>34</sup> Pemberton, J., dan K. Aritonang, *The Politics of Identity in Aceh: The Impact of the Helsinki Agreement* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2014).

<sup>35</sup> Nasution, S., *Politik Lokal dan Dominasi Sosial: Studi tentang Kebijakan Lokal di Aceh*. (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2002), hlm. 45–60.

Jürgen Habermas dalam teori ruang publiknya menyatakan bahwa ruang publik adalah arena interaksi yang bersifat rasional dan demokratis, di mana individu atau kelompok dapat saling berdebat dan menyusun kebijakan secara terbuka.<sup>36</sup> Namun, dalam konteks Aceh Tenggara, ruang publik dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya yang kuat, seperti identitas marga, yang membentuk cara individu dan kelompok berinteraksi dalam proses politik dan sosial. Hal ini menyebabkan ruang publik menjadi tidak sepenuhnya inklusif, karena dominasi marga tertentu dalam politik lokal seringkali membatasi ruang bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi.

#### **2.1.4 Dinamika Sosial dalam Ruang Publik**

Ruang publik di Aceh Tenggara bukan hanya terbatas pada pemerintahan atau lembaga negara, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial lainnya, seperti pasar, lembaga pendidikan, dan kehidupan adat. Dominasi marga dalam ruang publik ini terlihat jelas dalam akses terhadap posisi-posisi penting, seperti jabatan bupati dan anggota DPRD, yang sering kali dimenangkan oleh anggota marga. Marga-marga seperti Desky, Pinim dan Beruh menggunakan jaringan kekerabatan mereka untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat yang lebih luas, serta dari partai politik yang memiliki pengaruh kuat, seperti Golkar dan Partai Aceh.

Dominasi marga ini juga tercermin dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti proyek pembangunan dan distribusi anggaran daerah. Marga

---

<sup>36</sup> Habermas, J. The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. (Boston : MIT Press, 1991).

dominan seringkali mendapatkan prioritas dalam pengalokasian sumber daya ini, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di antara marga lain dan pendatang. Marga merujuk pada kelompok kekerabatan tertentu yang memiliki pengaruh besar, jumlah anggota signifikan, atau posisi kunci dalam pemerintahan/politik lokal. Dominasi ini membuat mereka seringkali menguasai sumber daya ekonomi, proyek pembangunan, dan distribusi anggaran daerah (APBD), sehingga menciptakan ketimpangan dengan marga lain.<sup>37</sup> Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal seperti suku Alas, pengaruh marga seringkali berlanjut dari generasi ke generasi, sehingga ketimpangan dalam akses ke ruang publik dan sumber daya menjadi semakin dalam.

#### **2.1.5 Dampak Dominasi Sosial terhadap Pembangunan Inklusif**

Salah satu dampak utama dari dominasi marga dalam ruang publik adalah terbatasnya akses bagi kelompok Marga lain dan pendatang untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Ketimpangan ini dapat menghambat pembangunan yang inklusif, karena keputusan-keputusan penting yang memengaruhi masyarakat luas sering kali dibuat oleh kelompok yang dominan saja.<sup>38</sup> Selain itu, dominasi marga juga dapat memperburuk ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesenjangan sosial.

Pembangunan yang tidak inklusif ini dapat menghalangi tercapainya tujuan pembangunan yang merata, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki

---

<sup>37</sup> Rasyid, M. A. "Marga dan Identitas Sosial Dalam Masyarakat Aceh: Analisis Antropologi Politik". *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. 5(2), 2017. 55-70.

<sup>38</sup> Wicaksono, P. Dominasi Sosial Dan Politik Identitas di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 14(3), 2006. 123-136.

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.<sup>39</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dominasi marga dalam ruang publik di Aceh Tenggara memengaruhi proses pembangunan dan bagaimana solusi inklusif dapat diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk marga lain dan pendatang, dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.

Dominasi sosial dalam konteks masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara tidak hanya terkait dengan penguasaan ruang publik oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga berakar pada sistem kekerabatan patrilineal yang kuat. Melalui jaringan kekerabatan dan modal sosial yang dimiliki, marga-marga lebih menonjol, seperti Desky, Pinim dan Beruh mengontrol posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan ekonomi, yang berkontribusi pada ketimpangan sosial dan politik. Untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan adil, perlu adanya kebijakan yang mempertimbangkan representasi yang lebih merata bagi marga lain dan pendatang, serta mengurangi ketergantungan pada politik identitas berbasis marga.

## 2.2 Sistem Kekerabatan Patrilineal dan Marga

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menentukan status kekerabatan dan identitas seseorang berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, hubungan sosial, hak waris, serta identitas marga biasanya diturunkan dari garis keturunan laki-laki.<sup>40</sup> Sistem

---

<sup>39</sup> McGibbon, R. *The Political Economy of Decentralization in Post-conflict Aceh: The Challenges of Restoring Order and Stability*. (Sydney : Australian National University Press, 2004). hlm 15-30.

<sup>40</sup> Kusuma, M. *Akibat Hukum Akta Adopsi yang Melanggar Hukum Adat Patrilineal*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 2022).hlm 10-20.

ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam keluarga dan kelompok sosial, dan secara lebih luas mengatur struktur sosial dan politik dalam masyarakat.

### **2.2.1 Konsep Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Secara umum, sistem kekerabatan patrilineal adalah salah satu bentuk dari berbagai sistem kekerabatan yang ada di dunia. Di dalam sistem ini, marga atau garis keturunan ayah menjadi unit penting yang menentukan status seseorang dalam masyarakat.<sup>41</sup> Dalam konteks ini, marga adalah kelompok keluarga besar yang berasal dari satu nenek moyang, dan anggotanya diikat oleh hubungan darah yang diturunkan melalui garis ayah. Selain itu, marga berfungsi untuk menjaga dan mengatur distribusi hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara, sistem kekerabatan patrilineal ini menjadi dasar bagi pembentukan struktur sosial dan politik. Marga dalam suku Alas tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai alat pengelompokan sosial yang penting dalam menentukan peran dan posisi seseorang dalam masyarakat.<sup>42</sup> Marga-marga besar seperti Desky, Pinim dan Beruh memiliki pengaruh politik yang sangat kuat karena hubungan kekerabatan mereka dengan tokoh-tokoh penting dan penguasa lokal.

### **2.2.2 Peran Marga dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal**

Marga di masyarakat suku Alas sangat penting dalam memengaruhi kehidupan sosial dan politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, marga

---

<sup>41</sup> Santika, S., & Eva, Y. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 2023. 25-40.

<sup>42</sup> Sekedang, A. S. "Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 2019. 45-58.

bukan hanya sekedar identitas keluarga atau klan, tetapi juga menjadi basis untuk mengakses kekuasaan. Dalam masyarakat patrilineal, marga berperan penting dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Setiap anggota marga memiliki kewajiban untuk mendukung dan melindungi kepentingan marga mereka, baik dalam konteks politik maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>43</sup>

Marga juga memainkan peran utama dalam penentuan status sosial seseorang. Misalnya, dalam proses pemilihan pemimpin lokal (seperti bupati), calon dari marga dominan sering mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat, baik karena jaringan kekerabatan yang mereka miliki maupun karena mereka dianggap sebagai bagian dari kelompok yang memiliki hak lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dominasi marga seperti ini sering kali mengarah pada monopoli kekuasaan, di mana marga-marga lebih besar keterwakilannya menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan, bisnis, dan lembaga-lembaga penting lainnya.

### 2.2.3 Marga dan Politik Identitas

Marga dalam masyarakat patrilineal juga memiliki kaitan erat dengan politik identitas, di mana identitas kelompok yang berasal dari marga tertentu dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dalam konteks politik lokal. Sebagai contoh, dalam konteks politik Aceh Tenggara, dominasi marga tertentu seperti Desky, Pinim dan Beruh dapat dilihat sebagai bentuk politik identitas berbasis kekerabatan.<sup>44</sup> Dukungan terhadap pemimpin yang berasal dari marga-marga

---

<sup>43</sup> Suwarno, S. "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Patrilineal". *Jurnal Sosiologi Universitas Lampung*. 14(3), 2022. 120-135.

<sup>44</sup> Pratiwi, D. "Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas sebagai Arena Sosialisasi Remaja". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 10(2), 2023. 80-95.

menonjol sering kali mengarah pada pembentukan koalisi berbasis marga yang kuat, dan ini memengaruhi proses pemilihan serta kebijakan publik yang diambil.

Hal ini berhubungan dengan teori politik identitas yang dikembangkan oleh berbagai ilmuwan politik, termasuk Benedict Anderson, yang menyatakan bahwa identitas kelompok (termasuk identitas berbasis marga) dapat menjadi kekuatan politik yang besar dalam membentuk kesadaran kolektif dan memobilisasi dukungan.<sup>45</sup> Dalam masyarakat Aceh Tenggara, marga seringkali dijadikan simbol untuk membedakan siapa yang berkuasa dan siapa yang kurang mendapatkan keterwakilan. Oleh karena itu, sistem kekerabatan patrilineal yang diatur melalui marga berfungsi untuk memperkuat dominasi politik dalam ruang publik.

#### **2.2.4 Marga sebagai Pengatur Akses Sosial dan Ekonomi**

Di dalam masyarakat patrilineal seperti suku Alas, marga berfungsi juga sebagai pengatur akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam distribusi sumber daya seperti tanah, kekayaan, dan hak atas kekuasaan politik, anggota marga dominan cenderung memiliki akses yang lebih besar dibandingkan dengan anggota marga yang lebih kecil atau marga pendatang. Sistem ini dapat menghasilkan ketimpangan sosial, di mana anggota marga dominan memiliki lebih banyak peluang untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan posisi-posisi kekuasaan.

Dalam penelitian oleh McGibbon tentang politik lokal di Aceh, ditemukan bahwa sistem marga seringkali menjadi penghalang bagi individu dari marga

---

<sup>45</sup> Khamdan, Muh. Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia. Penerbit A-Empat, 2022, hlm. 220.

minoritas untuk mendapatkan akses yang setara terhadap peluang sosial dan ekonomi.<sup>46</sup> Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan dalam masyarakat dan menghambat terciptanya pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, dominasi marga dalam konteks Aceh Tenggara perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

### 2.2.5 Eksogami dan Pengaruhnya terhadap Dominasi Marga

Salah satu aspek penting dari sistem marga di Aceh Tenggara adalah aturan eksogami yang berlaku di masyarakat suku Alas. Eksogami adalah aturan sosial yang melarang perkawinan antara anggota marga yang sama. Aturan ini dirancang untuk menjaga jaringan sosial lintas marga dan memperkuat hubungan antar kelompok, namun juga berfungsi untuk memperkuat struktur kekuasaan di dalam masyarakat.<sup>47</sup> Dalam konteks dominasi marga, eksogami memperlihatkan bagaimana marga-marga yang lebih menonjol, seperti Desky, Pinim dan Beruh memiliki kendali besar terhadap hubungan sosial dan ekonomi di luar marga mereka sendiri.

Praktik eksogami ini juga memastikan bahwa jaringan kekerabatan tetap berkembang, dan memungkinkan marga yang lebih menonjol untuk mempertahankan pengaruhnya dalam struktur sosial. Dalam beberapa kasus, ini dapat menciptakan sistem oligarki marga, di mana marga tertentu memiliki

---

<sup>46</sup> McGibbon, R. The political economy of decentralization in post-conflict Aceh: The challenges of restoring order and stability. Australian National University Press, 2014. hlm 15-30.

<sup>47</sup> Limpahala, F. "Pernikahan Beda Etnis Antara Suku Alas dengan Suku Jawa". (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2024). hlm 2.

pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan penting di tingkat lokal, politik, dan ekonomi.<sup>48</sup>

Sistem kekerabatan patrilineal yang berbasis marga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat suku Alas, khususnya di Aceh Tenggara. Marga bukan hanya sekadar identitas keluarga, tetapi juga menjadi basis bagi distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya sosial. Dominasi marga, yang sering kali mengarah pada oligarki marga, dapat memengaruhi proses politik, distribusi kekuasaan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, memahami sistem kekerabatan patrilineal dan peran marga dalam masyarakat adalah kunci untuk menganalisis dinamika sosial dan politik di Aceh Tenggara.

## **2.3 Ruang Publik Dan Politik Indentitas**

### **2.3.1 Konsep Ruang Publik**

Ruang publik adalah arena interaksi sosial di luar ranah pribadi, di mana individu dan kelompok berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyusun kebijakan bersama yang mempengaruhi kehidupan bersama. Menurut Jürgen Habermas (1991) dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere*, ruang publik adalah tempat di mana masyarakat dapat melakukan diskursus rasional mengenai masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi tanpa adanya kekuasaan dominan yang membatasi.<sup>49</sup> Ruang publik idealnya bersifat

---

<sup>48</sup> Kusuma, M. Akibat “*Hukum Akta Adopsi yang Melanggar Hukum Adat Patrilineal*” .(Jakarta : Universitas Indonesia, 2022). hlm 15.

<sup>49</sup> Habermas, J. *The structural transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press, 1991.27-30.

inklusif, terbuka untuk siapa saja, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan sosial.

Habermas menyatakan bahwa ruang publik modern yang berkembang di Eropa pada abad ke-18, terutama di kafe-kafe dan salon-salon intelektual, adalah tempat bagi warga negara untuk bertukar pendapat secara bebas dan rasional mengenai kebijakan pemerintah. Namun, dalam konteks masyarakat yang lebih tradisional dan terstruktur seperti di Aceh Tenggara, ruang publik seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial dan identitas budaya yang mendalam, sehingga tidak sepenuhnya bersifat terbuka atau inklusif.

Ruang publik di Aceh Tenggara, yang terdiri dari berbagai sektor seperti pemerintahan, pasar, lembaga pendidikan, dan media lokal, diwarnai oleh pengaruh kuat dari sistem marga. Dalam banyak kasus, ruang publik tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk pertukaran ide rasional, tetapi juga sebagai arena untuk memperjuangkan dan mempertahankan identitas marga tertentu.

### **2.3.2 Politik Identitas**

Politik identitas merujuk pada penggunaan identitas kelompok baik itu identitas etnis, agama, gender, atau dalam hal ini, marga sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam ruang publik. Stuart Hall, seorang pemikir terkenal di bidang studi budaya, menyatakan bahwa identitas adalah produk dari konstruksi sosial yang berproses melalui interaksi dengan kelompok lain dan dapat berubah seiring waktu. Politik identitas, menurut Hall, mengacu pada perjuangan kelompok-kelompok tertentu untuk mengakui identitas mereka, yang

sering kali terpinggirkan, dalam konteks yang lebih luas, seperti negara atau masyarakat.<sup>50</sup>

Di Indonesia, politik identitas sering kali menjadi kekuatan utama dalam mobilisasi sosial, terutama dalam konteks wilayah-wilayah yang memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang tinggi.<sup>51</sup> Di Aceh Tenggara, politik identitas berbasis marga menjadi fenomena yang sangat mencolok, karena marga bukan hanya sekedar penanda status sosial, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam politik lokal. Dominasi marga dalam ruang publik di Aceh Tenggara dapat dilihat sebagai bentuk dari politik identitas, di mana kelompok-kelompok yang berasal dari marga lebih menonjol, seperti Desky, Pinim Beruh menggunakan identitas kekerabatan mereka untuk mempertahankan kontrol atas kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi.

Hal ini terlihat jelas dalam proses pemilihan kepala daerah (Bupati) di Aceh Tenggara, di mana keberadaan marga lebih menonjol sering kali menjadi faktor penentu dalam memilih calon yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dengan masyarakat lokal. Marga-marga lebih menonjol ini tidak hanya mendapat dukungan dari anggota marga mereka, tetapi juga dari berbagai pihak yang terikat dengan mereka melalui hubungan sosial dan politik yang sudah terbentuk lama.

### **2.3.3 Ruang Publik dan Politik Identitas di Aceh Tenggara**

---

<sup>50</sup> Hall, S. Cultural identity and diaspora. In P. Werbner & T. Modood (Eds.), *Debating cultural hybridity: Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism*. (Zed Books, 1996.) (pp. 223-237).

<sup>51</sup> Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa. *Politik Islam di Persimpangan Jalan*. (Malang : CV. Azizah Publishing, 2019), hlm. 67.

Politik identitas di Aceh Tenggara dapat dipahami lebih lanjut dalam konteks sejarah dan budaya lokal. Sejak era pasca-konflik, terutama setelah penandatanganan MoU Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), politik identitas semakin menonjol, dengan pembentukan partai-partai politik lokal yang berfokus pada identitas etnis dan kekerabatan. Sebagai contoh, Partai Aceh, yang memiliki basis pendukung kuat di kalangan masyarakat Aceh, memainkan peran penting dalam politik lokal dan sering mengangkat isu-isu identitas etnis sebagai bagian dari agenda politiknya.<sup>52</sup>

Namun, di Aceh Tenggara, politik identitas ini sering kali mengarah pada oligarki marga, di mana hanya marga-marga tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan distribusi sumber daya. Marga Desky dan Pinim adalah dua contoh marga lebih menonjol yang sering mendominasi dalam berbagai sektor politik dan pemerintahan, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan anggota legislatif daerah.

Fenomena ini menyebabkan ketimpangan sosial, di mana marga lain atau pendatang sering kali kurang mendapat keterwakilan. Mereka yang berasal dari marga lain, seperti marga Jawa atau Minangkabau, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses kekuasaan atau mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan dan sektor ekonomi lokal.<sup>53</sup> Dalam banyak kasus, dukungan politik untuk kandidat

---

<sup>52</sup> Zulkarnain, M. "Aceh dalam konteks politik lokal dan pembangunan pasca-konflik". (Banda Aceh : Pustaka Aceh, 2020). hlm 40-60.

<sup>53</sup> Santika, S., & Eva, Y. Kewarisan dalam sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan bilateral. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 2023.hlm 25-40.

dari marga lebih menonjol seringkali dimobilisasi melalui jaringan kekerabatan dan partai politik lokal, yang memperkuat dominasi mereka.

#### **2.3.4 Ruang Publik dan Demokratisasi Pasca-Konflik**

Proses demokratisasi pasca-konflik di Aceh membuka ruang bagi perdebatan politik yang lebih terbuka. Namun, meskipun demokrasi telah memberi kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, politik identitas berbasis marga tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi hasil pemilu. Sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall dan Fealy,<sup>54</sup> politik identitas yang berbasis pada marga sering kali mengarah pada penguatan oligarki marga, yang pada gilirannya memperkuat ketimpangan sosial dan politik di Aceh Tenggara.

Perubahan sosial yang terjadi pasca-MoU Helsinki, seperti pemekaran wilayah dan transformasi dalam infrastruktur politik, memberi peluang bagi kelompok-kelompok baru untuk memperoleh peran lebih besar dalam politik lokal. Namun, dominasi marga yang sudah mapan tetap sulit dipatahkan, karena ketergantungan politik pada dukungan kekerabatan yang mendalam. Sistem ini, yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai alat untuk memperkuat solidaritas sosial, kini sering kali menjadi penghambat bagi pembangunan yang lebih inklusif dan pemerintahan yang lebih adil.

Secara keseluruhan, ruang publik di Aceh Tenggara dipengaruhi oleh politik identitas yang berbasis pada sistem kekerabatan dan marga. Marga lebih menonjol

---

<sup>54</sup> Aspinall, E., & Fealy, G. Local power and politics in Indonesia: Decentralization and democratization. Routledge, 2003.hlm 15-25

memainkan peran yang sangat besar dalam mengontrol akses ke kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, dan kesempatan sosial. Meskipun demokratisasi telah membawa perubahan, politik identitas berbasis marga terus memperkuat ketimpangan sosial, yang pada akhirnya menghambat terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan adil. Untuk menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan inklusif, perlu adanya upaya untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada politik identitas berbasis marga dan meningkatkan representasi yang lebih merata bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk marga lain dan pendatang.

## **2.4 Dampak Dominasi Terhadap Inklusivitas Sosial**

### **2.4.1 Pengertian Inklusivitas Sosial**

Inklusivitas sosial merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk memastikan bahwa semua anggotanya, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, agama, atau marga, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Inklusivitas sosial berhubungan dengan kesetaraan akses, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan penghargaan terhadap keberagaman.<sup>55</sup> Dalam masyarakat yang inklusif, tidak ada kelompok yang kurang mendapat keterwakilan atau dibatasi hak-haknya hanya karena identitas sosial atau kultural mereka.

Menurut Giddens, inklusivitas sosial dapat dicapai apabila struktur sosial memberikan kesempatan yang sama bagi individu untuk mengakses berbagai

---

<sup>55</sup> Amri, A., & Nasir, M. Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal terhadap Pewarisan Anak Perempuan dalam Suku Adat Alas (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 2018. 1–13. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i1.129>

peluang, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan jabatan politik. Sementara itu, ketimpangan sosial dan ketidakadilan terjadi ketika dominasi atau pengaruh

suatu kelompok membatasi akses kelompok lain terhadap berbagai peluang tersebut.

#### **2.4.2 Dominasi Sosial dan Pengaruhnya terhadap Inklusivitas Sosial**

Dominasi sosial merujuk pada penguasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, yang sering kali mengarah pada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Dalam konteks Aceh Tenggara, dominasi marga tertentu, seperti marga Desky, Pinimdan Beruh menciptakan ketimpangan sosial yang mempengaruhi inklusivitas sosial. Kelompok yang mendominasi marga sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, dan posisi strategis dalam masyarakat, sementara marga lain atau pendatang kurang mendapatkan keterwakilan.

Marga lebih menonjol, yang memiliki kontrol atas struktur sosial dan politik, berperan dalam mengakses posisi-posisi penting seperti bupati, wakil bupati, dan anggota DPRD. Posisi-posisi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi distribusi anggaran daerah, kebijakan pembangunan, serta akses ke proyek-proyek besar. Karena itu, marga yang tidak memiliki pengaruh politik yang kuat sering kali kurang keterwakilan dalam proses-proses ini, yang memperburuk ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

#### **2.4.3 Dampak Dominasi terhadap Akses terhadap Sumber Daya**

Salah satu dampak besar dari dominasi marga terhadap inklusivitas sosial adalah terbatasnya akses kelompok marga lain atau pendatang terhadap sumber daya penting dalam masyarakat.<sup>56</sup> Di Aceh Tenggara, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, proyek pembangunan, dan peluang usaha sering kali dikendalikan oleh marga lebih menonjol. Sementara itu, individu atau kelompok yang berasal dari marga lain atau pendatang, seperti etnis Jawa atau Minangkabau, seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya tersebut.

Sebagai contoh, dalam distribusi anggaran pembangunan daerah, marga lebih menonjol cenderung memiliki keuntungan lebih besar dalam hal proyek infrastruktur dan alokasi dana. Hal ini menciptakan ketimpangan yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi di masyarakat. Pembangunan yang tidak merata ini juga menghambat terciptanya kesempatan ekonomi yang setara, yang berpotensi menghalangi pencapaian pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

#### **2.4.4 Dominasi Marga dan Marginalisasi Kelompok Minoritas**

Dominasi marga dalam ruang publik juga berpotensi menyebabkan marginalisasi kelompok marga lain dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh Tenggara, marga seperti Desky, Beruh, dan Pinim sering kali memiliki peluang yang lebih besar dalam proses politik dan pemerintahan, sedangkan marga lainnya, terutama yang berasal dari luar Suku Alas, memiliki keterwakilan yang lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan

---

<sup>56</sup> Edward Aspinall dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization* (London: Routledge, 2003), hlm. 15–25.

serta berdampak pada belum meratanya kesempatan bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini menciptakan kurang keterwakilan politik dan menghambat pemberdayaan kelompok marga lain.

Politik identitas berbasis marga menjadi faktor yang memperburuk marginalisasi ini, karena politik lokal sering kali berfokus pada loyalitas terhadap marga tertentu, bukan pada prinsip keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan kepala daerah di mana kandidat yang berasal dari marga lebih menonjol sering kali mendapatkan dukungan lebih besar dari partai politik dan jaringan sosial yang ada<sup>57</sup>. Sementara itu, calon dari marga lain atau pendatang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang setara, meskipun mereka mungkin memiliki kualifikasi yang sama.

#### **2.4.5 Ketimpangan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial**

Dominasi marga yang mengarah pada ketimpangan sosial tidak hanya berpengaruh pada akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan ini sering kali memperburuk keretakan sosial di dalam komunitas, di mana hubungan antar kelompok yang berbeda menjadi semakin terpolarisasi. Marga lebih menonjol mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, sementara kelompok marga lain atau pendatang sering merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak.

---

<sup>57</sup> Perdana, A. P., & Muslih, S. "Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum 2024 di Lampung". *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 2023. hlm 227–238.

Ketimpangan sosial ini juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Jika dominasi marga terus berlanjut tanpa adanya perubahan kebijakan, masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sistem untuk menyediakan kesempatan yang setara bagi semua orang. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

#### **2.4.6 Upaya untuk Meningkatkan Inklusivitas Sosial**

Untuk meningkatkan inklusivitas sosial di Aceh Tenggara, perlu adanya upaya kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah daerah, seperti memastikan representasi yang adil bagi marga marga lain dalam politik lokal dan pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah kuota representasi untuk marga lain dalam lembaga legislatif dan eksekutif, yang akan memastikan bahwa suara seluruh masyarakat, termasuk kelompok marga lain, dapat terdengar.<sup>58</sup>

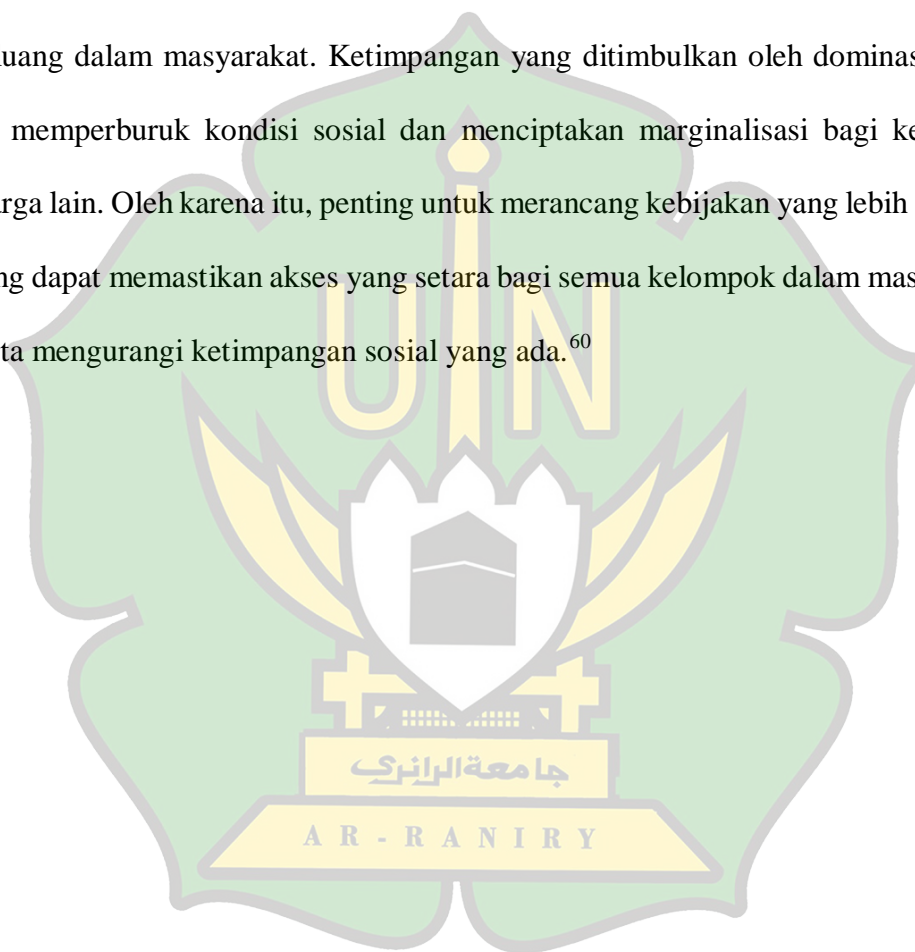
Penting juga untuk meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan marga atau latar belakang etnis. Dengan memberikan kesempatan yang lebih merata dalam hal pendidikan dan pengembangan keterampilan, masyarakat dapat memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai kelompok sosial dapat

---

<sup>58</sup> Edward Aspinall dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization* (London: Routledge, 2003), hlm. 15–25.

membantu mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari marga marga dalam proses pembangunan daerah.<sup>59</sup>

Secara keseluruhan, dominasi marga di Aceh Tenggara berdampak signifikan terhadap inklusivitas sosial, di mana kelompok-kelompok lebih menonjol memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan, sumber daya, dan peluang dalam masyarakat. Ketimpangan yang ditimbulkan oleh dominasi marga ini memperburuk kondisi sosial dan menciptakan marginalisasi bagi kelompok marga lain. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif, yang dapat memastikan akses yang setara bagi semua kelompok dalam masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial yang ada.<sup>60</sup>



---

<sup>59</sup> Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge: MIT Press, 1991), hlm. 27–40.

<sup>60</sup> Rodd McGibbon, *The Political Economy of Decentralization in Post-conflict Aceh* (Canberra: Australian National University Press, 2004), hlm. 15–30.

### **BAB III**

## **DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

### **3.1 Pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara**

Dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan fenomena sosial yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat suku Alas. Dalam sistem ini, marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar pembentukan jaringan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari tokoh adat, pemimpin marga, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRK, serta masyarakat dari marga minor, ditemukan bahwa dominasi marga dalam ruang publik di Aceh Tenggara terjadi melalui beberapa pola utama, yaitu melalui pengaruh dalam struktur adat, jaringan kekerabatan dalam politik, pengaruh dalam distribusi jabatan publik, serta pengaruh dalam akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi.

Dalam masyarakat Aceh Tenggara terdapat 27 marga yang terdiri dari marga asli dan marga pendatang. Keberadaan marga tersebut menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat Alas. Setiap marga memiliki hubungan kekerabatan dan pengaruh sosial yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat.

Berikut daftar 27 marga di Aceh Tenggara:

Tabel 3.1.1  
Daftar 27 Marga di Aceh Tenggara

<b>NO</b>	<b>Nama Marga</b>	<b>Kategori</b>
1	Selian	Marga Asli
2	Desky	Marga Asli
3	Bangko	Marga Asli

4	Cibro	Marga Asli
5	Keling	Marga Asli
6	Kepale Dese	Marga Asli
7	Kerues	Maega Asli
8	Pagan	Marga Asli
9	Beruh	Marga Pendatang
10	Pinim	Marga Pendatang
11	Sekedang	Marga Pendatang
12	Pelis	Marga Pendatang
13	Munthe	Marga Pendatang
14	Sambo	Marga Pendatang
15	Manik	Marga Pendatang
16	Ramud	Marga Pendatang
17	Karo-Karo	Marga Pendatang
18	Acih	Marga Pendatang
19	Gale	Marga Pendatang
20	Tarigan	Marga Pendatang
21	Sinage	Marga Pendatang
22	Sepayu	Marga Pendatang
23	Mecawan	Marga Pendatang
24	Mahe	Marga Pendatang
25	Pase	Marga Pendatang
26	Ramin	Marga Pendatang
27	Sugihen	Marga Pendatang

Dalam masyarakat Aceh Tenggara dikenal adanya sistem kekerabatan berdasarkan marga. Marga menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat Alas karena berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, adat istiadat, serta kehidupan sosial dan politik masyarakat. Secara umum terdapat 27 marga di Aceh Tenggara yang terdiri dari marga asli dan marga pendatang. Berikut daftar marga yang terdapat di Aceh Tenggara.

### **3.1.1 Hubungan Kekeluargaan Marga Desky, Pinim dan Beruh**

Dalam masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, hubungan kekeluargaan antar marga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Sistem kekerabatan masyarakat Alas yang bersifat patrilineal menjadikan marga sebagai identitas utama dalam menentukan hubungan sosial,

solidaritas kelompok, dan jaringan kekuasaan. Hubungan antar marga tidak hanya terbentuk melalui garis keturunan, tetapi juga diperkuat melalui hubungan adat, perkawinan, dan kerja sama sosial dalam kehidupan masyarakat.

Marga Beruh, Desky, dan Pinim merupakan marga yang memiliki hubungan sosial dan kekeluargaan yang cukup erat dalam masyarakat Alas. Hubungan tersebut terbentuk melalui perkawinan antar marga (eksogami) yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sistem perkawinan ini menyebabkan terbentuknya jaringan kekerabatan yang luas sehingga hubungan antar marga menjadi semakin kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh Tenggara. Selain hubungan adat dan perkawinan, kedekatan antar marga juga terlihat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Dalam musyawarah adat, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan anggota DPRK, hubungan kekeluargaan sering menjadi dasar terbentuknya dukungan sosial dan politik.

Masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada tokoh yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan marga dengan mereka. Hubungan kekeluargaan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara. Marga yang memiliki jaringan sosial dan kekeluargaan luas cenderung lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat serta memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pemerintahan dan politik lokal. Oleh karena itu, hubungan antara marga Beruh, Desky, dan Pinim tidak hanya bersifat budaya dan adat, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap pola distribusi kekuasaan di Aceh Tenggara.

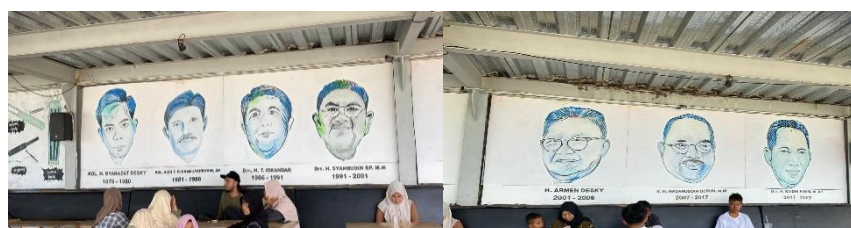
### **3.1.2 Data Kepemimpinan**

Untuk melihat pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara, salah satu indikator yang dapat dianalisis adalah data kepemimpinan daerah, khususnya jabatan Bupati dari masa ke masa. Melalui data kepemimpinan ini dapat diketahui apakah terdapat kecenderungan kemunculan marga tertentu dalam struktur kekuasaan formal di tingkat daerah. Keberadaan nama-nama pemimpin daerah tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kelompok sosial yang memiliki akses lebih besar dalam menduduki jabatan publik.

Berikut disajikan data kepemimpinan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara beserta informasi marganya:

Tabel 3.1.2 Data Kepemimpinan Kabupaten Aceh Tenggara

No	Periode	Bupati	Marga
1	1975-1980	Kol. H. Syahadat Desky	Desky
2	1981-1986	Kol. AURI T. Djohan Syahbudi, SH	-
3	1986-1991	Drs. H. T. Iskandar	-
4	1991-2001	Drs. H. Syahbudin BP, M.M	Beruh
5	2001-2006	H. Armen Desky	Desky
6	2007-2017	Ir. H. Hasanuddin Beruh, M.M.	Beruh
7	2017-2022	Drs. H. Raidin Pinim, M.AP	Pinim



Gambar 3.1 Foto Riwayat Bupati Aceh Tenggara  
Sumber: Dokumentasi Penulis 25 Maret 2026

Berdasarkan Tabel 3.1.1 dan dokumentasi kepemimpinan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, terlihat bahwa beberapa nama pemimpin daerah memiliki keterkaitan dengan marga tertentu yang dikenal dalam masyarakat suku Alas, seperti marga Desky, Beruh, dan Pinim. Kemunculan marga-marga tersebut dalam jabatan Bupati menunjukkan bahwa posisi kekuasaan formal di tingkat daerah cenderung berada pada kelompok sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur masyarakat.

Marga Desky terlihat muncul lebih dari satu kali, yaitu pada masa Kol. H. Syahadat Desky dan H. Armen Desky. Kemunculan kembali marga yang sama dalam jabatan Bupati menunjukkan adanya kesinambungan pengaruh kekerabatan dalam ruang politik lokal. Setelah itu, kepemimpinan daerah juga diisi oleh Hasanuddin Beruh dan Raidin Pinim yang sama-sama berasal dari marga yang memiliki posisi penting di tengah masyarakat Aceh Tenggara.

Selain itu, kehadiran Hasanuddin Beruh dan Raidin Pinim sebagai pimpinan daerah menunjukkan bahwa marga tertentu memiliki posisi yang kuat dalam politik Aceh Tenggara. Bersama Marga Desky, marga Beruh dan Pinim dikenal luas serta memiliki pengaruh di tengah masyarakat, sehingga kekuasaan politik cenderung berputar pada kelompok marga tersebut.

Untuk memahami fenomena ini lebih jauh, tidak cukup hanya melihat jabatan formal. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui pandangan mereka terkait dominasi marga Desky, Beruh, dan Pinim dalam politik lokal Aceh Tenggara. Informan Mengenai Dominasi Marga Desky, Beruh, dan Pinim dalam Politik Lokasi Aceh Tenggara.

Jaini Anwar selaku pegawai Sekretariat DPRK Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dalam komposisi pimpinan maupun anggota legislatif, nama-nama dari Marga Beruh, Desky, dan Pinim lebih sering muncul dibandingkan marga lainnya karena telah memiliki jaringan politik yang kuat dan terbentuk sejak lama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dominasi tersebut bukan hanya terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya kesinambungan relasi politik yang terus dipertahankan.

Selanjutnya, Hasanudin dan Sanadi mengatakan bahwa masyarakat Alas masih memiliki ikatan kekerabatan yang sangat erat, sehingga dalam kontestasi politik dukungan masyarakat cenderung mengarah kepada calon yang berasal dari marga yang sudah dikenal luas. Kedekatan genealogis tersebut menjadikan marga tertentu lebih mudah memperoleh legitimasi sosial serta kepercayaan masyarakat.

Hal yang sama juga diperkuat oleh Gerlam Pandigian dan Suprianto yang menyatakan bahwa nama marga masih menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Calon yang berasal dari marga besar dinilai lebih mudah membangun dukungan karena mempunyai jaringan keluarga, relasi sosial, dan pengaruh yang lebih luas.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa pengulangan kemunculan Marga Desky, Beruh, dan Pinim pada jabatan politik strategis bukan hanya tercatat dalam dokumen pemerintahan, tetapi juga dibenarkan oleh realitas sosial masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat bahwa ketiga marga tersebut merupakan marga yang memiliki posisi dominan dalam distribusi kekuasaan politik lokal di Kabupaten Aceh Tenggara.

Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti juga menyajikan data mengenai daftar ketua dan anggota DPRK Aceh Tenggara dari periode 2004–2009. Data ini digunakan untuk melihat pola keterwakilan marga dalam struktur legislatif secara lebih konkret. Melalui data tersebut, dapat diketahui apakah kemunculan marga tertentu terjadi secara berulang dalam setiap periode. Jika pola tersebut terus muncul, maka hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kekuasaan yang memperkuat dugaan dominasi marga dalam politik lokal Aceh Tenggara. Di bawah ini akan Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2004-2009) sebagai berikut:

Tabel 3.1.3  
Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2004-2009)

No	Nama	Jabatan	Marga
1	H. Umuruddin Desky, S. Sos.,M.M.	Ketua DPRK	Desky
2	Drs. H. Sjech Ahmadin, M.M.	Wakil Ketua DPRK	-
3	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.	Wakil DPRK	Selian
4	H. Baharuddin Beruh, S.P	Anggota	Beruh
5	Khuzaimah Husni, S.Pdi.	Anggota	Pinim
6	H. Syarifudin Selian, S.So	Anggota	Selian
7	Rabumun	Anggota	Pinim
8	Rasjidun Pagan	Anggota	Pagan
9	Roy Darwan Tarigan	Anggota	Tarigan
10	Yeni Bakri	Anggota	-

11	Ernita	Anggota	Desky
12	Yonni Siahaan	Anggota	-
13	Buhari Selian	Anggota	Selian
14	H. Abdul Salam	Anggota	-
15	M. Sopian Desky, S.Ag	Anggota	Desky
16	Gamaluddin	Anggota	-
17	Muhammad Jalil	Anggota	Beruh
18	Jabarudin	Anggota	-
19	Nurlelawati	Anggota	-
20	Iriana	Anggota	-
21	Paisal Pinim	Anggota	Pinim
22	Armansyah, M.S.	Anggota	-
23	H. Syeh Saman	Anggota	-
24	H. Haddin	Anggota	-

Tabel 3.1.4

Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Periode (2009-2014)

NO	Nama	Jabatan	Marga
1	H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M	Ketua DPRK	Selian
2	Drs. H. Syahbudin BP, M.M	Wakil Ketua DPRK	Beruh
4	Irwandi Desky	Anggota	Desky
5	Siti Khadijah	Anggota	-
6	Maringan Aritonang	Anggota	-

7	Bukhari	Anggota	Pinim
8	Buhari Selian	Anggota	Selian
9	Rasyidin,S.Ag.	Anggota	-
10	Dr. Suhelman	Anggota	-
11	Regen Sugandi	Anggota	Desky
12	Muhammad Yunir	Anggota	Pinim
13	Nazarudin	Anggota	Desky
14	Roy Darmawan Sekedang,Amd.	Anggota	Sekedang
15	H. Marhusin Beruh,Spd.	Anggota	Beruh
16	H. Rajidun Pagan, S.E.	Anggota	Pagan
17	Ernita	Anggota	Desky
18	Abdul Malik	Anggota	-
19	Rino Andika, S.Sos	Anggota	-
20	H. Samsir	Anggota	Pinim
21	Tgk Affan Husni	Anggota	Sekedang
22	M. Sopian Desky	Anggota	Desky
23	Ir. Budimansyah	Anggota	-

Tabel 3.1.5

Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Period(2014-2019)

No	Nama	Jabatan	Marga
1	H. Irwandi Desky, S.P.	Ketua DPRK	Desky
2	Nazarudin Desky	Wakil Ketua DPRK	Desky

3	M. Sopian Desky,S.Ag.	Anggota	Desky
4	Nurlelawati	Anggota	-
5	Kamirun Munthe	Anggota	Munthe
6	Timbul Hasudangan Samosir	Anggota	-
7	Rita Muliati	Anggota	Pinim
8	Bustami	Anggota	-
9	Gabe Mertua Tembunan	Anggota	-
10	Hepri Gunawan	Anggota	-
11	Arnold Napitupul	Anggota	-
12	Drs. H. M. Yamin Saipi	Anggota	Beruh
13	Hasanusi	Anggota	Sekedang
14	H. Helena	Anggota	-
15	Takdir Edy Winta,S.T.	Anggota	-
16	Barudin	Anggota	Desky
17	Ir. Felix Subrianto	Anggota	-
18	Sahudin	Anggota	Desky
19	H. Johanuddin Desky	Anggota	Desky
20	Supian	Anggota	-
21	Royan Taringan	Anggota	Tarigan
22	H. Bukhari	Anggota	Pinim
23	Jaminah	Anggota	Pinim
24	Jamudin	Anggota	Selian

25	Raidin Pinim	Anggota	Pinim
25	Muhammad Daud	Anggota	-
26	Usman Efendi	Anggota	-
27	Ir Budimansya	Anggota	
28	Teuku dedi Faisal, S.T	Anggota	-
29	Sofyan Efendi	Anggota	-

Sumber : P2K STEKOM Ensiklopedia DPRK Aceh Tenggara, diakses 6 Mei 2026.

Tabel 3.1.6  
Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Period(2019-2024)

No	Nama	Jabatan	Marga
1	Denny Febrian Roza	Ketua DPRK	Beruh
2	Maruan Hanafi	Wakil Ketua DPRK	Sekedang
3	Jamudin Selian	Wakil Ketua DPRK	Selian
4	Tomi Selian	Anggota	Selian
5	Bustami Ramud	Anggota	Ramud
6	Riyanto	Anggota	Pinim
7	Luhut	Anggota	-
8	Jaini	Anggota	Pinim
9	H. Irwandi Desky	Anggota	Desky
10	Gabe Martua Tembunan	Anggota	-
11	H. Suhailudin	Anggota	Beruh
	Hasanusi Sekedang	Anggota	Sekedang

	Samsuariadi	Anggota	-
	Hj. Julia Susan	Anggota	Beruh
	Rudi Desky	Anggota	Desky
	H. Marwan Husni	Anggota	-
	Muhammad Mufti Desky	Anggota	Desky
	Jamudin Selian	Anggota	Selian
	Kasri	Anggota	Pinim
	Sukri win Bungsu	Anggota	-
	Rajuan Jenggot	Anggota	-
	Roy Hendra Puenomo	Anggota	-
	Musyadi	Anggota	Beruh
	Jumatun Pinim	Anggota	Pinim
	Jaminah	Anggota	-
	Elpizen	Anggota	-
	Supian	Anggota	Pinim
	Teuku Dedi Faisal Selian	Anggota	-

Tabel 3.1.7

Daftar Ketua dan Anggota DPRK Aceh Tenggara Period(2024-2029)

No	Nama	Jabatan	Marga
1	Denny Febrian Roza, S.STP., M.Si.	Ketua DPRK	Beruh
2	Gegoh Mustawa Madya	Wakil Ketua DPRK	Pinim
3	H. Bukhari	Wakil Ketua DPRK	Pinim

4	Putri Niken Jile	Anggota	Beruh
5	Intan Permata Sari	Anggota	Beruh
6	Muhari Kasturi	Anggota	-
7	H. Bustami Ramud	Anggota	-
8	Maruan Hanafi	Anggota	-
9	Munampak	Anggota	-
10	Timbul Hasudungan	Anggota	-
11	Mirza Al Mahbubi S. T.,M.T.	Anggota	Pinim
12	Marawal Hakim	Anggota	Desky
13	Arnold	Anggota	-
14	Musliandi	Anggota	Desky
15	Dian Reza Pahlevi, S. H.	Anggota	-
16	Samsuariandi	Anggota	-
17	Abi Hasan. S.H.	Anggota	Beruh
18	M. Mufty Desky, S.T.	Anggota	Desky
19	Musyadi, S.Pd.	Anggota	-
20	Marwan Husni	Anggota	-
21	Sahidin Basri	Anggota	Pinim
22	Gerlam	Anggota	-
23	Marsidin	Anggota	Pinim

24	Anugrah Rizky Putra	Anggota	Beruh
25	Satria Abadi, S.A.P.	Anggota	-
26	M. Rafi Sekedang	Anggota	Sekedang
27	Ronal Halimoan, S.H.	Anggota	-
28	Aliyas	Anggota	-

Sumber : P2K STEKOM Ensiklopedia DPRK Aceh Tenggara, diakses 6 Mei 2026.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa beberapa marga seperti Desky, Pinim, dan Beruh memiliki frekuensi kemunculan yang lebih tinggi dalam keanggotaan DPRK selama beberapa periode. Untuk memastikan apakah hal tersebut merupakan bentuk dominasi atau tidak, diperlukan analisis kuantitatif sederhana melalui rekapitulasi jumlah dan persentase. Di bawah ini akan menjelaskan tentang persentase keterwakilan Marga dalam DPRK Aceh Tenggara (2004-2009) sebagai berikut:

Tabel 3.1.8  
Persentase Keterwakilan Marga dalam DPRK Aceh Tenggara (2004–2029)

No	Marga	Jumlah	Presentase
1	Desky	18	14%
2	Pinim	16	12%
3	Beruh	12	9%
4	Total 3 marga	46	35%
5	Marga Lainnya	85	65%
6	Total Keseluruhan	131	100%

*Sumber : Berdasarkan data keanggotaan DPRK Aceh Tenggara periode 2004–2029.<sup>61</sup>*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa marga Desky memiliki jumlah keterwakilan tertinggi dalam DPRK Aceh Tenggara selama lima periode, yaitu sebanyak 18 orang atau sekitar 14% dari total keseluruhan anggota. Selanjutnya, marga Pinim menempati posisi kedua dengan jumlah 16 orang atau sekitar 12%, disusul oleh marga Beruh dengan 12 orang atau sekitar 9%. Jika ketiga marga tersebut digabungkan, maka total keterwakilannya mencapai 45 orang atau sekitar 35% dari keseluruhan anggota DPRK. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari kursi legislatif di Aceh Tenggara diisi oleh anggota yang berasal dari tiga marga tersebut. Sementara itu, sisa 65% lainnya tersebar di berbagai marga lain yang jumlahnya lebih banyak, namun masing-masing memiliki keterwakilan yang relatif kecil.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan dominasi politik oleh marga tertentu dalam struktur kekuasaan legislatif daerah. Dominasi tersebut tidak berarti bahwa marga lain tidak memiliki kesempatan, namun distribusi kekuasaan terlihat tidak merata. Marga Desky, Pinim, dan Beruh tampak memiliki keunggulan dalam hal akses terhadap kekuasaan politik dibandingkan marga lainnya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial di mana jaringan sosial, hubungan kekerabatan, dan kepercayaan kolektif menjadi modal penting dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Masyarakat Alas, marga berfungsi sebagai jaringan sosial yang kuat, sehingga individu yang berasal dari marga tertentu cenderung memiliki peluang

---

<sup>61</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Kabupaten_Aceh_Tenggara)

lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar, baik dalam bentuk jaringan, pengaruh sosial, maupun pengalaman politik. Marga-marga dominan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari elit lokal yang secara konsisten hadir dalam struktur kekuasaan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan dominasi relatif oleh marga Desky, Pinim, dan Beruh dalam DPRK Aceh Tenggara selama periode 2004–2029. Dominasi ini bukan bersifat absolut, namun cukup signifikan untuk menunjukkan adanya pola ketimpangan dalam distribusi kekuasaan berbasis marga.

Selain dilihat dari jumlah keterwakilan anggota DPRK, dominasi marga dalam ruang politik Aceh Tenggara juga dapat dianalisis melalui konsistensi kemunculan marga tertentu dalam setiap periode pemilihan legislatif. Kehadiran marga yang sama secara berulang menunjukkan adanya kesinambungan jaringan sosial dan politik yang mampu mempertahankan pengaruhnya dalam struktur kekuasaan daerah. Dalam konteks masyarakat Alas, faktor kekerabatan, hubungan keluarga, serta kedekatan sosial masih memiliki pengaruh dalam membentuk dukungan politik masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan keterwakilan Marga Desky, Pinim, dan Beruh dalam DPRK Aceh Tenggara dapat menjadi indikator adanya pengaruh politik yang relatif kuat dibandingkan marga lainnya. Untuk melihat pola kemunculan tersebut, dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.9

Kemunculan Marga Desky, Pinim, dan Beruh dalam DPRK Aceh Tenggara Periode 2004–2029

No	Marga	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2024-2029	Total Periode Kemunculan
1	Desky	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	Pinim	✓	✓	✓	✓	✓	5
3.	Beruh	✓	✓	✓	✓	✓	5

Tabel 3.1.8 di atas menunjukkan bahwa Marga Desky dan Pinim hadir secara konsisten dalam setiap periode keanggotaan DPRK Aceh Tenggara sejak tahun 2004 hingga 2029. Sementara itu, Marga Beruh juga menunjukkan keberlanjutan keterwakilan politik dengan muncul pada lima periode. Konsistensi kemunculan ini memperlihatkan bahwa marga tertentu memiliki jaringan politik yang lebih stabil dibandingkan marga lainnya.

Keberlanjutan keterwakilan tersebut menunjukkan bahwa dinamika politik di Aceh Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas individu calon, tetapi juga oleh faktor sosial dan kekerabatan yang melekat dalam struktur masyarakat Alas. Hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon tertentu. Kondisi ini menyebabkan marga yang telah memiliki jaringan politik kuat cenderung lebih mudah mempertahankan eksistensinya dalam setiap periode pemilihan legislatif.

Selain itu, konsistensi kemunculan Marga Desky, Pinim, dan Beruh dalam beberapa periode DPRK menunjukkan adanya kesinambungan pengaruh politik yang dimiliki ketiga marga tersebut dalam ruang publik Aceh Tenggara. Dominasi politik tidak selalu ditunjukkan melalui jumlah mayoritas anggota, melainkan juga

dapat dilihat dari kemampuan kelompok tertentu mempertahankan keterwakilan politiknya secara terus-menerus. Dengan demikian, keberadaan ketiga marga tersebut dalam hampir seluruh periode DPRK menjadi indikator adanya pengaruh politik yang relatif kuat dalam struktur kekuasaan lokal.

Berdasarkan tabel jabatan strategis DPRK di atas, dapat dilihat bahwa Marga Desky, Pinim, dan Beruh tidak hanya memiliki keterwakilan sebagai anggota DPRK, tetapi juga menduduki posisi penting dalam struktur legislatif daerah. Beberapa tokoh dari ketiga marga tersebut tercatat pernah menjabat sebagai Ketua maupun Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara dalam beberapa periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh politik ketiga marga tidak hanya terlihat dari jumlah keterwakilan, tetapi juga dari kemampuan memperoleh posisi strategis dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, jabatan strategis yang diduduki oleh ketiga marga tersebut memperlihatkan adanya pengaruh dan jaringan politik yang cukup kuat dalam struktur kekuasaan lokal di Aceh Tenggara. Sebagai berikut:

Tabel 3.1.10

Jabatan Strategis DPRK yang Diduduki Marga Desky, Pinim, dan Beruh

No	Nama	Marga	Jabatan	Periode
1	Umuruddin Desky	Desky	Ketua DPRK	(2004-2009)
2	Irwandi Desky	Desky	Ketua DPRK	(2014-2019)
3	Nazaruddin Desky	Desky	Wakil Ketua DPRK	(2014-2019)
4	Bukhari Pinim	Pinim	Wakil Ketua DPRK	(2024-2029)
5	Gegoh Mustawa Madya	Pinim	Wakil Ketua DPRK	(2024-2029)
6	Denny Febrian Roza, S.STP., M.Si.	Beruh	Ketua DPRK	(2019-2024)

7	Denny Febrian Roza, S.STP., M.Si.	Beruh	Ketua DPRK	(2024-2029)
8	Syahbudin BP Beruh	Beruh	Wakil Ketua DPRK	(2009-2014)

Berdasarkan tabel 3.1.9 perbandingan kemunculan marga dalam DPRK Aceh Tenggara tahun 2004–2029, terlihat bahwa Marga Desky dan Beruh memiliki jumlah keterwakilan paling tinggi dibandingkan marga lainnya, kemudian diikuti oleh Marga Pinim. Sementara itu, beberapa marga lain hanya muncul dalam jumlah yang relatif sedikit pada periode tertentu. Perbedaan tingkat keterwakilan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi kekuatan politik antar marga di Aceh Tenggara.

Tingginya jumlah kemunculan Marga Desky, Pinim, dan Beruh menunjukkan bahwa ketiga marga tersebut memiliki jaringan sosial dan politik yang lebih kuat dalam kontestasi politik lokal. Keberlanjutan keterwakilan yang terjadi selama beberapa periode memperlihatkan bahwa dukungan politik terhadap marga tertentu masih memiliki pengaruh dalam proses pemilihan anggota legislatif di Aceh Tenggara.

Selain itu, perbedaan jumlah keterwakilan antar marga menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki peluang politik yang sama dalam struktur legislatif daerah. Marga yang memiliki jaringan politik lebih besar cenderung lebih mudah mempertahankan eksistensinya dibandingkan marga lain yang memiliki keterbatasan pengaruh politik. Dengan demikian, kondisi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan dominasi politik oleh marga tertentu dalam struktur DPRK Aceh Tenggara. Sebagai Berikut:

Tabel 3.1.11

Perbandingan Kemunculan Marga dalam DPRK Aceh Tenggara Tahun 2004–2029

No	Marga	Jumlah Kemunculan
1	Desky	18
2	Pinim	16
3	Beruh	12
4	Selian	8
5	Sekedang	5
6	Pagan	2
7	Tarigan	2
8	Munthe	1
9	Ramud	1

Berdasarkan tabel 3.1.10 di atas, Marga Desky, Pinim, dan Beruh memiliki tingkat keterwakilan yang lebih tinggi dibandingkan marga lainnya dalam DPRK Aceh Tenggara. Marga Desky dan Beruh tercatat sebagai marga dengan jumlah kemunculan tertinggi, diikuti oleh Pinim. Perbedaan jumlah keterwakilan ini menunjukkan adanya kecenderungan dominasi politik oleh marga tertentu dalam struktur legislatif daerah.

Tingginya tingkat kemunculan ketiga marga tersebut memperlihatkan bahwa mereka memiliki jaringan sosial dan politik yang lebih kuat dibandingkan marga lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari konsistensi keterwakilan yang terus muncul dalam beberapa periode DPRK Aceh Tenggara. Keberlanjutan tersebut

menunjukkan bahwa pengaruh marga masih memiliki peranan dalam membentuk dukungan politik masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, perbedaan jumlah keterwakilan antar marga menunjukkan bahwa tidak semua marga memiliki peluang politik yang sama dalam struktur legislatif daerah. Marga yang memiliki pengaruh politik lebih besar cenderung lebih mudah mempertahankan eksistensinya dalam kontestasi politik lokal. Dengan demikian, data tersebut memperlihatkan adanya pola dominasi politik oleh marga tertentu dalam ruang publik dan struktur kekuasaan di Aceh Tenggara.<sup>62</sup>

### 3.1.3 Intraksi Sosial dan Hubungan Kekerabatan Sesama Marga

Salah satu bentuk dominasi marga dalam ruang publik dapat dilihat dari peran marga dalam struktur sosial dan adat masyarakat suku Alas. Dalam masyarakat ini, marga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat suku Alas, diketahui bahwa marga memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai keputusan sosial dan adat di masyarakat.

Seorang tokoh adat suku Alas menyatakan:

*“Dalam masyarakat Alas, marga itu sangat penting. Setiap orang dikenal dari marganya. Dalam urusan adat, musyawarah kampung, bahkan dalam penyelesaian konflik, peran marga sangat menentukan karena tokoh-tokoh adat biasanya berasal dari marga yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.”*<sup>63</sup>

<sup>62</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Kabupaten_Aceh_Tenggara)

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi Pelis. Kepada Bid Hasanah Adat, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga menjadi mekanisme yang mengatur struktur kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Marga yang memiliki jumlah anggota besar serta jaringan kekerabatan yang luas cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan adat maupun sosial. Tokoh adat lainnya juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa marga yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan marga lainnya.

*“Ada beberapa marga yang memang sejak dulu punya pengaruh kuat di Aceh Tenggara, seperti marga Desky, Pinim dan Beruh. Karena mereka punya banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik, maka suara mereka sering lebih didengar dalam berbagai keputusan.”<sup>64</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik tidak hanya terbentuk melalui faktor politik modern, tetapi juga melalui legitimasi adat yang telah berkembang secara historis dalam masyarakat.

Sistem marga di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk pola interaksi sosial masyarakat. Individu yang berasal dari satu marga dipandang memiliki hubungan kekerabatan yang erat, bahkan diposisikan layaknya saudara kandung. Ikatan ini tidak hanya berlaku dalam lingkungan tempat tinggal, tetapi juga tetap terjaga ketika berada di luar daerah. Ketika sesama anggota marga bertemu, mereka cenderung menjalin hubungan yang akrab, saling membantu, serta menunjukkan solidaritas yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat, Sanadi Pinim, dijelaskan bahwa hubungan sesama marga pada masa dahulu sangat kuat dan penuh solidaritas :

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Hasanudin Beruh. Bidang Hasanah Adat, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

*“Dulu kalau satu marga itu dianggap satu keluarga. Kalau ketemu di mana pun, walaupun di luar daerah, tetap dianggap saudara. Jadi saling bantu, saling jaga, dan tidak boleh saling menikah karena dianggap satu keturunan.”<sup>65</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai dasar utama dalam membentuk hubungan sosial masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari kuatnya ikatan tersebut adalah adanya larangan perkawinan antar sesama marga, yang didasarkan pada anggapan bahwa satu marga berasal dari satu garis keturunan.

Selain itu, dalam aspek sosial dan politik lokal, solidaritas marga juga terlihat dalam kecenderungan memberikan dukungan kepada anggota marga yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Dukungan tersebut muncul karena adanya rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap kelompok kekerabatan. Namun, dalam perkembangan masyarakat saat ini, ikatan sosial berbasis marga mulai mengalami perubahan. Nilai-nilai solidaritas yang dahulu sangat kuat kini mulai memudar. Hal ini sebagaimana disampaikan kembali oleh Suhardi Pelis:

*“Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Anak-anak sekarang sudah lebih bebas bergaul, tidak terlalu melihat marga. Bahkan ada yang sudah menikah sesama marga, walaupun dulu itu tidak boleh”<sup>66</sup>*

Perubahan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kesamaan marga, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan pergaulan, serta modernisasi.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Sanadi Pinim. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Sanadi Pinim. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

Dengan demikian, kuatnya interaksi sosial dan solidaritas sesama marga menjadi salah satu dasar terbentuknya dominasi marga dalam ruang publik. Hal ini karena hubungan kekerabatan tersebut mendorong munculnya loyalitas dan dukungan antar anggota marga, khususnya dalam konteks sosial dan politik.

### 3.1.4 Jaringan Kekerabatan sebagai Basis Mobilisasi Politik

Selain melalui struktur adat, dominasi marga dalam ruang publik juga terbentuk melalui jaringan kekerabatan yang dimanfaatkan sebagai basis mobilisasi dukungan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemimpin marga di Aceh Tenggara, jaringan kekerabatan marga memiliki peran penting dalam proses mobilisasi dukungan politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Salah satu pemimpin marga menyatakan:

*“Dalam politik di Aceh Tenggara, hubungan kekerabatan sangat berpengaruh. Ketika ada calon dari marga tertentu maju dalam pemilihan, biasanya anggota marga akan memberikan dukungan karena merasa memiliki ikatan keluarga.”<sup>67</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk basis dukungan politik di masyarakat. Dukungan ini tidak hanya berasal dari anggota marga yang sama, tetapi juga dari jaringan sosial yang terhubung melalui hubungan perkawinan maupun hubungan adat. Pemimpin marga lainnya juga menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam memperoleh posisi politik sering kali dipengaruhi oleh kekuatan jaringan marga yang dimilikinya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Kaidan Selian. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak M. Sardi Pelis. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

*“Jika seseorang berasal dari marga yang besar dan memiliki banyak jaringan keluarga, biasanya peluangnya untuk mendapatkan dukungan politik juga lebih besar. Karena dalam masyarakat kita, hubungan keluarga masih sangat dihargai.”*

Hal ini menunjukkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik tidak hanya terbentuk melalui kekuatan individu, tetapi juga melalui kekuatan kolektif jaringan kekerabatan yang dimiliki oleh marga tersebut.

### 3.1.5 Pengaruh Marga dalam Distribusi Jabatan Publik

Dominasi marga dalam ruang publik juga dapat dilihat dari pengaruh marga dalam distribusi jabatan politik dan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat pemerintah daerah, faktor marga sering kali menjadi salah satu pertimbangan dalam dinamika politik lokal. Seorang pejabat pemerintah daerah menyatakan:

*“Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor marga masih berpengaruh dalam politik di Aceh Tenggara. Dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam proses politik lainnya, identitas marga sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat.”<sup>69</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik politik lokal, identitas marga masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan arah dukungan politik masyarakat.

Anggota DPRK Aceh Tenggara juga mengungkapkan bahwa latar belakang marga sering kali memengaruhi pola dukungan politik di masyarakat.

*“Dalam proses pencalonan maupun pemilihan anggota DPRD, faktor marga sering menjadi salah satu pertimbangan penting. Masyarakat*

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Jaini Anwar, Spsi, Pegawai DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

*biasanya lebih mudah memberikan dukungan kepada calon yang berasal dari marga yang mereka kenal atau memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka.”<sup>70</sup>*

Fenomena ini menunjukkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik tidak hanya terjadi dalam struktur sosial masyarakat, tetapi juga tercermin dalam struktur politik dan pemerintahan daerah.

### **3.1.6 Dampak Dominasi Marga terhadap Kelompok Marga Minor**

Dominasi marga dalam ruang publik juga memiliki dampak terhadap kelompok masyarakat yang berasal dari marga lain atau kelompok pendatang. Dalam beberapa kasus, kelompok marga lain merasa memiliki keterbatasan dalam mengakses ruang publik dibandingkan dengan marga yang lebih dominan.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan dari marga minor yang diwawancarai dalam penelitian ini. Seorang warga dari marga minor menyatakan:

*“Sebagai orang dari marga yang tidak terlalu besar, kadang kami merasa akses ke politik atau jabatan publik tidak semudah bagi orang yang berasal dari marga besar. Biasanya yang punya jaringan keluarga besar lebih mudah mendapatkan dukungan.”<sup>71</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap peluang sosial dan politik di masyarakat. Namun demikian, beberapa informan juga menyatakan bahwa hubungan antar marga dalam kehidupan sehari-hari tetap berlangsung secara harmonis, meskipun terdapat perbedaan pengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Gerlam Pandigian, S.Pd., M.Si. Anggota DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Hamzah. Masyarakat, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

### 3.1.7 Analisis Pola Dominasi Marga dalam Ruang Publik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

- a. Legitimasi adat, di mana marga memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat suku Alas.
- b. Jaringan kekerabatan, yang berfungsi sebagai basis mobilisasi dukungan politik dalam pemilihan umum maupun dalam proses politik lainnya.
- c. Distribusi kekuasaan politik, di mana individu yang berasal dari marga dominan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh posisi dalam pemerintahan.
- d. Pengaruh sosial dan ekonomi, yang memungkinkan marga tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat.
- e. Solidaritas sosial sesama marga, yang terbentuk melalui interaksi kekerabatan yang erat dan menjadi dasar munculnya loyalitas serta dukungan antaranggota marga, baik dalam kehidupan sosial maupun politik.

Dengan demikian, dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan fenomena yang terbentuk melalui interaksi antara struktur adat tradisional dengan dinamika politik modern. Sistem kekerabatan yang kuat, yang tercermin dalam solidaritas dan hubungan sosial sesama marga, menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat keberlangsungan dominasi tersebut, meskipun dalam

perkembangannya mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh modernisasi.

### **3.2 Faktor Dominasi Marga Dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara**

Dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial, budaya, dan politik yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Dalam masyarakat suku Alas, marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar pembentukan jaringan sosial, solidaritas kelompok, serta distribusi kekuasaan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tokoh adat, pemimpin marga, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRK, serta masyarakat dari marga minor, ditemukan bahwa dominasi marga dalam ruang publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: faktor historis dan kultural, jaringan kekerabatan, kekuatan politik elektoral, serta akses terhadap sumber daya dan kekuasaan.

#### **3.2.1 Faktor Historis dan Budaya Masyarakat Alas**

Salah satu faktor utama yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara adalah faktor historis dan budaya masyarakat suku Alas. Dalam struktur sosial masyarakat Alas, marga merupakan bagian penting dari sistem adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut tokoh adat suku Alas, marga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat. Seorang tokoh adat suku Alas menjelaskan:

*“Dalam masyarakat Alas, marga itu bukan sekadar nama keluarga, tetapi juga menjadi dasar dalam kehidupan sosial. Sejak dulu, keputusan adat biasanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dari marga tertentu yang memiliki kedudukan kuat di masyarakat.”<sup>72</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa marga telah lama menjadi bagian dari struktur kekuasaan sosial dalam masyarakat Alas. Dalam praktiknya, marga yang memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan adat cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ruang publik dan politik lokal. Tokoh adat lainnya juga menyatakan bahwa hubungan antara sistem adat dan politik modern di Aceh Tenggara masih sangat kuat. *“Walaupun sekarang sistem pemerintahan sudah modern, pengaruh adat dan marga tetap ada. Banyak keputusan politik juga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan marga.”<sup>73</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa dominasi marga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor politik kontemporer, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat.

### **3.2.2 Jaringan Kekerabatan dan Solidaritas Marga**

Faktor lain yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik adalah kuatnya jaringan kekerabatan dalam masyarakat suku Alas. Hubungan kekerabatan antara anggota marga menciptakan solidaritas sosial yang kuat, sehingga marga dapat menjadi basis mobilisasi dukungan dalam berbagai aktivitas sosial dan politik.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi Pelis. Kepala Bid Hasanah Adat, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Hasanudin Beruh. Bidang Hasanah Adat, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

Pemimpin marga Desky menjelaskan bahwa jaringan kekerabatan memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh marga di ruang publik. Hal yang sama juga dapat dilihat pada marga Beruh yang memiliki jaringan kekerabatan luas serta pengaruh dalam struktur sosial dan politik lokal di Aceh Tenggara. *“Kekuatan marga itu sebenarnya dari hubungan keluarga. Kalau ada anggota marga yang maju dalam politik atau jabatan publik, biasanya keluarga besar akan memberikan dukungan.”*<sup>74</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh pemimpin marga Pinim yang menekankan bahwa solidaritas internal marga sering menjadi faktor penentu dalam mobilisasi dukungan politik. *“Dalam masyarakat kita, hubungan marga sangat kuat. Dukungan dari keluarga dan kerabat bisa mempengaruhi hasil pemilihan atau posisi seseorang dalam jabatan publik.”*<sup>75</sup>

Jaringan kekerabatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi juga menjadi mekanisme informal dalam distribusi kekuasaan. Dengan adanya dukungan dari anggota marga yang luas, individu dari marga tertentu memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan maupun lembaga politik.

### **3.2.3 Faktor Politik dan Mobilisasi Dukungan Elektoral**

Dominasi marga dalam ruang publik juga dipengaruhi oleh faktor politik, khususnya dalam proses pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Suprianto S.E.ASN, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Sanadi Pinim. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

Dalam konteks politik lokal di Aceh Tenggara, identitas marga sering kali menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan dukungan politik. Seorang anggota DPRK Aceh Tenggara menjelaskan bahwa marga sering memengaruhi proses pencalonan dan dukungan politik dalam pemilihan umum. *“Dalam proses pencalonan anggota DPRK, faktor marga sering menjadi pertimbangan. Kandidat yang berasal dari marga besar biasanya memiliki basis dukungan yang lebih kuat di masyarakat.”*<sup>76</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menyatakan bahwa identitas marga sering menjadi faktor penting dalam dinamika politik lokal. *“Tidak bisa dipungkiri bahwa marga memiliki pengaruh dalam politik daerah. Dukungan dari kelompok marga bisa menentukan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.”*<sup>77</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa marga berfungsi sebagai basis sosial yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan politik. Dalam sistem demokrasi lokal, dukungan dari komunitas marga dapat menjadi modal sosial yang penting bagi calon pemimpin daerah.

### **3.2.4 Akses terhadap Kekuasaan dan Sumber Daya**

Faktor lain yang memperkuat dominasi marga dalam ruang publik adalah akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Marga yang telah lama memiliki posisi dalam struktur pemerintahan atau politik biasanya memiliki akses yang lebih besar

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Manumpak Sibarani, S.E. Anggota DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar Jaini, S Psi. Pegawai DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

terhadap berbagai peluang ekonomi dan sosial. Seorang pejabat pemerintah daerah menjelaskan bahwa marga yang memiliki jaringan politik kuat cenderung lebih mudah mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

*“Ketika satu marga sudah memiliki banyak tokoh di pemerintahan atau politik, biasanya mereka memiliki jaringan yang lebih luas. Hal ini membuat anggota marga tersebut lebih mudah mendapatkan akses ke jabatan publik.”<sup>78</sup>*

Kondisi ini kemudian menciptakan pola reproduksi kekuasaan, di mana marga yang telah memiliki posisi dominan cenderung mempertahankan pengaruhnya dalam struktur pemerintahan maupun lembaga politik.

### **3.2.5 Persepsi Ketimpangan dari Marga Minor**

Dominasi marga dalam ruang publik juga dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berasal dari marga minor. Beberapa informan dari kelompok marga minor menyatakan bahwa dominasi marga tertentu dapat memengaruhi akses terhadap kesempatan sosial dan politik. Seorang warga dari marga minor menjelaskan: *“Kadang-kadang kami merasa bahwa marga tertentu lebih mudah mendapatkan kesempatan dalam jabatan atau politik. Bagi marga kecil, peluangnya tidak selalu sama.”*

Namun demikian, sebagian masyarakat juga menilai bahwa hubungan antar-marga dalam kehidupan sehari-hari tetap berjalan dengan baik. *“Walaupun ada marga yang lebih dominan dalam politik, dalam kehidupan sosial masyarakat sebenarnya tetap rukun dan saling menghormati.”<sup>79</sup>*

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Suprianto S.E.ASN, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendra Yahdi.Masyarakat, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dominasi marga tidak selalu menimbulkan konflik terbuka, tetapi dapat menciptakan persepsi ketimpangan dalam akses terhadap ruang publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor historis-budaya, jaringan kekerabatan, mobilisasi politik, serta akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Dalam masyarakat suku Alas, marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keberadaan jaringan kekerabatan yang kuat memungkinkan marga tertentu membangun solidaritas sosial dan mobilisasi dukungan politik yang efektif. Namun demikian, dominasi marga juga dapat menimbulkan tantangan dalam sistem demokrasi lokal, terutama terkait dengan pemerataan akses terhadap ruang publik dan representasi politik bagi berbagai kelompok masyarakat.

### **3.3 Dampak Dominasi Marga Terhadap Kehidupan Sosial dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara**

Dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya memengaruhi dinamika politik lokal, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat serta proses pembangunan daerah. Dalam masyarakat suku Alas, keberadaan marga sebagai identitas sosial memiliki peran penting dalam membentuk hubungan sosial, distribusi kekuasaan, serta pola interaksi antarindividu dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh adat, pemimpin marga, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRK, serta masyarakat dari marga minor, ditemukan bahwa dominasi marga memiliki berbagai dampak yang bersifat positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Secara umum, dampak tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu penguatan solidaritas sosial masyarakat, pengaruh terhadap dinamika politik lokal, ketimpangan akses dalam ruang publik, serta dampaknya terhadap pemerataan pembangunan daerah.

### 3.3.1 Penguatan Solidaritas Sosial dalam Masyarakat

Salah satu dampak positif dari keberadaan marga dalam masyarakat adalah terciptanya solidaritas sosial yang kuat antara anggota marga. Dalam masyarakat suku Alas, marga menjadi sarana yang memperkuat hubungan kekeluargaan serta kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh adat suku Alas menjelaskan bahwa sistem marga memiliki fungsi penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat. *“Marga dalam masyarakat Alas memiliki fungsi untuk memperkuat hubungan kekeluargaan. Jika ada masalah atau kegiatan sosial, biasanya anggota marga akan saling membantu satu sama lain.”*<sup>80</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan marga dapat menciptakan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Solidaritas ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial seperti kegiatan adat, acara pernikahan, kegiatan keagamaan, serta penyelesaian konflik dalam masyarakat.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi Pelis. Kepala Bid Hasanah Adat, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

Pemimpin marga juga menegaskan bahwa hubungan antaranggota marga biasanya sangat erat dan saling mendukung. *“Dalam kehidupan masyarakat kami, anggota marga biasanya saling mendukung. Jika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, anggota marga lain biasanya akan membantu.”*<sup>81</sup>

Dengan demikian, dominasi marga dalam kehidupan sosial dapat memperkuat kohesi sosial serta mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat.

### **3.3.2 Pengaruh Terhadap Dinamika Politik Lokal**

Selain dalam kehidupan sosial, dominasi marga juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam beberapa kasus, marga menjadi basis dukungan politik bagi calon pemimpin daerah maupun anggota legislatif. Seorang anggota DPRK Aceh Tenggara menjelaskan bahwa dukungan dari kelompok marga sering menjadi faktor penting dalam proses pemilihan umum.

*“Dalam proses pemilihan anggota DPRK maupun kepala daerah, dukungan dari kelompok marga sangat berpengaruh. Kandidat yang memiliki dukungan dari marga besar biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk menang.”*<sup>82</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa identitas marga dapat berfungsi sebagai modal sosial dan politik bagi individu yang ingin terlibat dalam kontestasi politik.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Sanadi Pinim. Anggota MAA, Aceh Tenggara. 25 Februari 2026.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Gerlam Pandigian S.E. Anggota DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

Dukungan dari jaringan kekerabatan marga dapat membantu mobilisasi suara dalam pemilihan umum.

Namun demikian, kondisi ini juga dapat memunculkan kecenderungan politik identitas yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi lokal. Seorang pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan pandangannya mengenai fenomena tersebut. *“Pengaruh marga dalam politik memang ada. Dalam beberapa kasus, dukungan masyarakat lebih didasarkan pada kesamaan marga daripada program kerja atau kapasitas kandidat.”*<sup>83</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dominasi marga dapat memengaruhi pola perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

### **3.3.3 Ketimpangan Akses dalam Ruang Publik**

Dampak lain dari dominasi marga adalah munculnya persepsi ketimpangan akses dalam ruang publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang berasal dari marga minoritas. Dalam beberapa kasus, masyarakat dari marga minoritas merasa bahwa peluang untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan atau politik tidak selalu sama dengan marga yang lebih dominan. Seorang warga dari marga minoritas mengungkapkan pengalamannya: *“Kadang-kadang kami merasa bahwa marga tertentu lebih mudah mendapatkan jabatan atau posisi dalam pemerintahan. Sementara bagi marga yang lebih kecil, peluangnya terasa lebih terbatas.”*<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Suprianto S.E. ASN, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Mhd. Zulfhadli. Masyarakat Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dominasi marga dapat menimbulkan persepsi ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kesempatan dalam ruang publik. Namun demikian, sebagian masyarakat juga menilai bahwa hubungan antar-marga dalam kehidupan sosial tetap berjalan secara harmonis. *“Walaupun ada marga yang lebih dominan dalam politik, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tetap hidup rukun dan saling menghormati.”*<sup>85</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dominasi marga dalam struktur kekuasaan, hubungan sosial antaranggota masyarakat masih dapat berjalan dengan baik.

#### **3.3.4 Dampak Terhadap Pemerataan Pembangunan Daerah**

Dominasi marga dalam struktur kekuasaan juga berpotensi memengaruhi proses pembangunan daerah. Dalam beberapa kasus, keberadaan tokoh dari marga tertentu dalam pemerintahan dapat memengaruhi distribusi program pembangunan. Seorang pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menjelaskan bahwa jaringan sosial dan politik dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan. *“Dalam beberapa situasi, hubungan sosial dan jaringan politik memang bisa memengaruhi prioritas pembangunan. Namun secara prinsip pemerintah tetap berusaha menjalankan pembangunan secara merata.”*<sup>86</sup>

Sementara itu, anggota DPRK Aceh Tenggara menekankan bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendra Yahdi. Masyarakat, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Suprianto S.E.ASN, Aceh Tenggara. 27 Maret 2026.

pembangunan. *“Kami di DPRK berusaha memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Aceh Tenggara.”*<sup>87</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun dominasi marga memiliki potensi memengaruhi kebijakan pembangunan, institusi pemerintahan tetap berupaya menjaga prinsip pemerataan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

Di satu sisi, keberadaan marga dapat memperkuat solidaritas sosial dan memperlerat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Marga juga dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sosial bagi anggotanya dalam berbagai aktivitas kehidupan. Namun di sisi lain, dominasi marga juga dapat menimbulkan tantangan dalam sistem demokrasi lokal, terutama terkait dengan distribusi kekuasaan, akses terhadap ruang publik, serta pemerataan pembangunan daerah. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan politik di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip demokrasi modern, sehingga keberadaan marga tetap dapat menjadi kekuatan sosial yang positif bagi pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Munampak Sibarani, S.E Anggota DPRK, Aceh Tenggara. 27 Februari 2026.

### 3.5 Analisa Penulis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara memang benar terjadi dan masih sangat kuat. Hal ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat suku Alas, di mana marga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut analisis penulis, dominasi marga terlihat jelas dalam bidang politik dan pemerintahan. Marga-marga tertentu seperti Desky dan Pinim lebih sering menduduki jabatan penting, seperti bupati, anggota DPRK, dan posisi dalam birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap kekuasaan tidak sepenuhnya terbuka untuk semua marga.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa jaringan kekerabatan menjadi faktor utama yang memperkuat dominasi ini. Dukungan masyarakat sering kali diberikan berdasarkan kesamaan marga, bukan karena kemampuan atau program kerja. Jadi, hubungan keluarga dan kedekatan sosial sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang mendapatkan kekuasaan. Dari sisi budaya, sistem patrilineal membuat masyarakat memiliki loyalitas yang tinggi terhadap marganya. Ini menyebabkan politik identitas berbasis marga menjadi kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh Tenggara. Akibatnya, persaingan dalam politik tidak hanya soal kualitas individu, tetapi juga soal asal marga.

Dampak dari dominasi ini menurut penulis cukup besar. Di satu sisi, memang bisa memperkuat solidaritas dalam satu marga. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan ketimpangan, terutama bagi marga minorita dan pendatang yang sulit mendapatkan akses ke ruang publik. Ini juga bisa menghambat terciptanya pemerintahan yang adil dan merata. Menurut penulis, dominasi marga ini bukan

hanya masalah politik, tetapi sudah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat yang sudah lama terbentuk. Oleh karena itu, untuk mengubah kondisi ini dibutuhkan waktu dan usaha bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dominasi marga di Aceh Tenggara terjadi karena adanya pengaruh budaya, sosial, dan politik yang saling berkaitan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menghambat pembangunan yang inklusif dan merata di masyarakat.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pola dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara masih cukup kuat dan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat. Marga tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar pembentukan jaringan sosial, solidaritas kelompok, serta mobilisasi dukungan politik. Dalam praktiknya, beberapa marga tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses politik lokal, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, serta dalam distribusi jabatan dalam pemerintahan daerah.

Faktor yang menyebabkan dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu faktor historis dan budaya, jaringan kekerabatan yang kuat, mobilisasi dukungan politik, serta akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Dalam masyarakat suku Alas, sistem marga telah menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Hubungan kekerabatan yang kuat antaranggota marga memungkinkan terbentuknya solidaritas sosial yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan politik maupun sosial anggota marga tersebut.

Dominasi marga dalam ruang publik memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Di satu sisi, keberadaan marga dapat memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, dominasi marga juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap ruang publik, terutama bagi kelompok

masyarakat yang berasal dari marga minor. Kondisi ini dapat memengaruhi distribusi kekuasaan serta peluang dalam memperoleh posisi dalam pemerintahan maupun lembaga politik.

Dengan demikian, fenomena dominasi marga dalam ruang publik di Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya berkaitan dengan aspek politik semata, tetapi juga merupakan bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan modern.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam upaya menciptakan kehidupan sosial dan politik yang lebih inklusif di Kabupaten Aceh Tenggara.

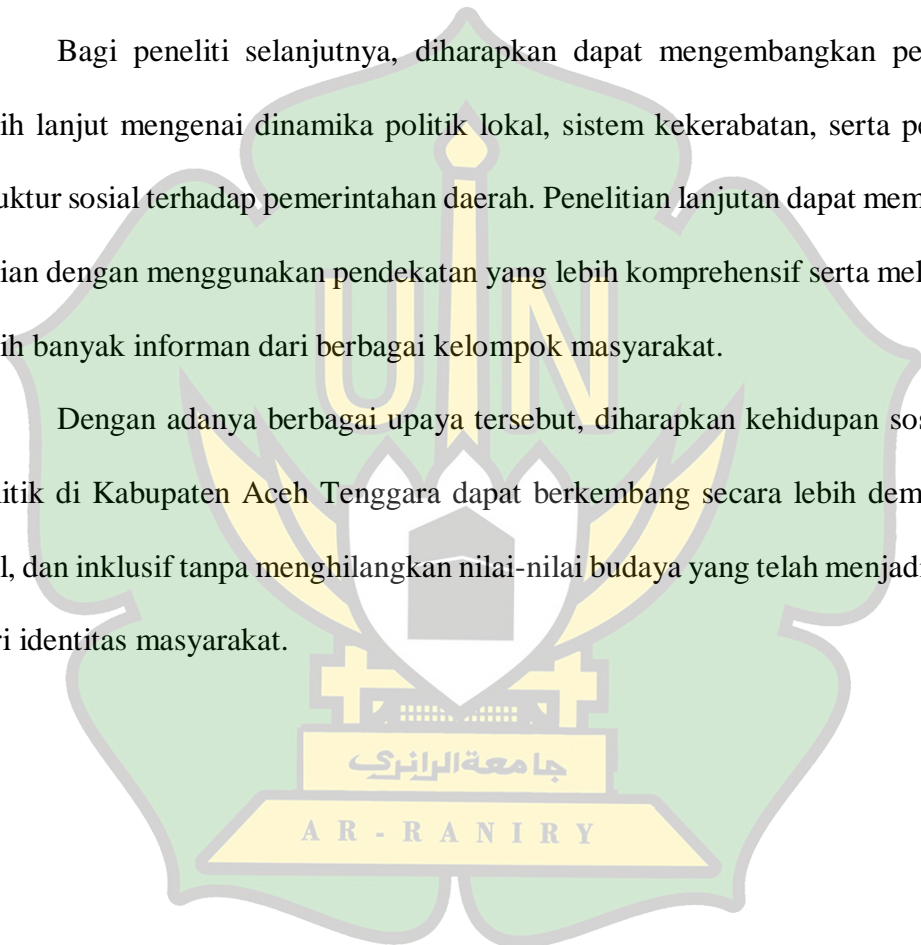
Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, adil, dan inklusif dalam proses pengambilan kebijakan maupun distribusi jabatan publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang marga.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat terus menjaga nilai-nilai persatuan dan keharmonisan antar-marga dalam kehidupan sosial. Keberadaan marga sebagai identitas budaya seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan sebagai faktor yang menimbulkan perbedaan atau ketimpangan dalam masyarakat.

Bagi tokoh adat dan pemimpin masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Tokoh adat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sistem marga tidak seharusnya menjadi penghambat bagi terciptanya keadilan sosial dan politik.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika politik lokal, sistem kekerabatan, serta pengaruh struktur sosial terhadap pemerintahan daerah. Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kelompok masyarakat.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan kehidupan sosial dan politik di Kabupaten Aceh Tenggara dapat berkembang secara lebih demokratis, adil, dan inklusif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aspinall, Edward, dan Greg Fealy. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization*. Singapore: ISEAS Publishing. 2003.
- Aspinall, Edward & Berenschot, Ward. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Gerdien Jonker : Bielefeld: Transcript. (Global, local Islam). 2019.
- Bourdieu, P. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press. 1986.
- Dedi Sahputra Napitupulu & Rahmat Asri Sufa. *Politik Islam di Persimpangan Jalan*. Malang : CV. Azizah Publishing. 2019.
- Giddens, A. *Sociology* (6th ed.). Cambridge: Polity Press. 2009.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press. 1991.
- Limpahala, F. *Pernikahan Beda Etnis Antara Suku Alas dengan Suku Jawa*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. 2024.
- McGibbon, R. *The Political Economy of Decentralization in Post-Conflict Aceh: The Challenges of Restoring Order and Stability*. Australian National University Press. 2014.
- Mills, C. W. *The power elite*. New York: Oxford University Press. 1956.
- Khamdan, Muh. *Politik Identitas Dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi Dalam Politik Elektoral Di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2022.
- Kusuma, M. *Akibat Hukum Akta Adopsi yang Melanggar Hukum Adat Patrilineal*. Jakarta : Universitas Indonesia. 2022.
- Pemberton, J. & Aritonang, K. *The politics of identity in Aceh: The impact of the Helsinki Agreement*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 2014.
- Zulkarnain, M. *Aceh dalam Konteks Politik Lokal dan Pembangunan Pasca-Konflik*. Banda Aceh : Pustaka Aceh. 2020.
- SETARA Institute. *Indeks Inklusi Sosial Indonesia*. Jakarta: SETARA Institute. 2025.

## Jurnal

- Jariatun Fitrah, Mirsa Astuti. “Ketentuan Adat Alas di Aceh Tenggara Tentang Larangan Perkawinan Semarga “. *Eduyustisia (Jurnal Edukasi Hukum)* : Vol 2, No 3 (2024), DOI : <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/20072>
- Hall, S. *Cultural identity and diaspora*. In P. Werbner & T. Modood (Eds.), *Debating cultural hybridity: Multi-cultural identities and the politics of anti-racism* (pp. 223-237). Zed Books. 1996.
- Pratiwi, D.. “Mepahukh dalam Upacara Pernikahan Suku Alas sebagai Arena Sosialisasi Remaja “. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 10(2), 80-95. 2023.
- Rasyid, M. A. “Marga dan identitas sosial dalam masyarakat Aceh“: Analisis antropologi politik. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 5(2), 55-70. 2017.
- Said, A. “Politik identitas dan perubahan sosial di Aceh“: Kasus Aceh Tenggara. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 45-58. 2018.
- Santika, S., & Eva, Y. “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, dan Bilateral“. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 25-40. 2023.
- Sekedang, A. S. “Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara“. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 45-58. 2019.
- Suwarno, S. “Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Patrilineal“. *Jurnal Sosiologi Universitas Lampung*, 14(3), 120-135. 2022.
- Wicaksono, P. (2006). “Dominasi sosial dan politik identitas di Indonesia “. *Jurnal Sosiologi*, 14(3), 123-136.
- Amri, A., & Nasir, M. “Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal terhadap Pewarisan Anak Perempuan dalam Suku Adat Alas“ (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v12i1.129>. 2018.
- Arief, I. A., & Lestari, I. “Kontestasi Wacana Politik Identitas dalam Ruang Digital Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara“. *Journal Publicuho*, 6(4), 1311–1324. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272>. 2023.
- Perdana, A. P., & Muslih, S. “Dampak Politik Identitas pada Pemilihan Umum“ 2024 di Lampung. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 227–238. 2023.

## Skripsi

- Nasution, S. (2002). *Politik lokal dan dominasi sosial: “Studi tentang kebijakan lokal di Aceh“*. Universitas Sumatera Utara .

### Web

<https://kutacaneku.blogspot.com/2011/01/sejarah-suku-alas-dan-marganya.html?m=1> 2011

<https://lintasgayo.co/2014/08/02/di-alas-aceh-tenggara-ada-27-marga-aceh-dan-gayo-marga-baru/>

<https://planetbatak.blogspot.com/2013/08/suku-batak-alas.html?m=1>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Bupati\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Aceh_Tenggara). 11 Maret 2025

<https://www.idezia.com/2024/09/Daftar.Bupati.Aceh.Tenggara.html?m=1>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Aceh\\_Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara) 16 September 2025.

<https://id.scribd.com/document/863819099/Bupati-dan-Wakil-Bupati-Aceh-Tenggara>. 9 Januari 2025

### Wawancara

Wawancara dengan Gerlam Pandigian, S.Pd., M.Si. Aceh Tenggara, 27 Februari, 2026

Wawancara dengan Hamzah, Aceh Tenggara, 5 Maret, 2026

Wawancara dengan Hasanudin Selian, Aceh Tenggara 25 Februari, 2026

Wawancara dengan Jaini Anwar, S.Psi, Kabupaten Aceh Tenggara, 27 Februari 2026

Wawancara dengan Kaidan Selian, Aceh Tenggara 25 Februari, 2026

Wawancara dengan M Sardi Pelis, Aceh Tenggara, 25 Februari 2026

Wawancara dengan Manumpak Sibarani, S.E Aceh Tenggara, 28 Februari 2026

Wawancara dengan Mhd.Zulfhadli Aceh Tenggara, 27 Maret, 2026.

Wawancara dengan Sanadi Pinim, Aceh Tenggara, 25 Februari, 2026

Wawancara dengan Suhardi Pelis, Aceh Tenggara 25 Februari, 2026

Wawancara dengan Suhendra Yahdi, Aceh Tenggara, 27, Maret 2026

Wawancara dengan Suprianto S.E, Aceh Tenggara, 27 Maret, 2026

## LAMPIRAN I

( SK )



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**NOMOR:2501/Un.08/FAH/KP.004/10/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

- Kesatu** : Menunjuk saudara :
- 1). Dr. Bustami A. Bakar, M.Hum. ( Pembimbing Pertama )
- 2). Hamdina Wahyuni, M.Ag. ( Pembimbing Kedua )

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

**Nama** : Wulandari

**Nim** : 220501005

**Prodi** : Sejarah dan Kebudayaan Islam

**Judul** : Dominasi Marga dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara

- Masa Bimbingan** : Enam Bulan TMT 02 Desember 2025 s/d 02 Juni 2026
- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal 02 Oktober 2025  
 Dekan,

Syarifuddin

- Tembusan :**
1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
  2. Pembimbing skripsi / karya ilmiah / tugas akhir
  3. Dosen Penasihat Akademik yang bersangkutan;
  4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## LAMPIRAN II

## SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3230/Un.08/FAH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Bapak Bupati Aceh Tenggara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220501005

Nama : WULANDARI

Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat : KUTE LAWE PASARAN TEUKU MBELIN TEUKU MBELIN KUTE  
LAWE PASARAN TEUKU MBELIN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **DOMINASI MARGA DALAM RUANG PUBLIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Banda Aceh, 22 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 23 Februari 2026

Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.  
NIP. 197101101999031002

AR - RANIRY

## LAMPIRAN III

( Surat Balasan Penelitian I )



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

فمرنتاه كيوفتين اجيه تنگارا سكرناربات ديوان فراكيلن ركيات كيوفتين  
 Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp. (0629) 522892 - 21015 Fax. (0629) 21015 E-mail : sekretariatdprkagara20@gmail.com

KUTACANE 24651

Nomor : 35 /Set-DPRK/III/ 2026  
 Lampiran : 1 (satu) Eks  
 Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Kutacane, 11 Maret 2026  
 Kepada Yth :  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 kelembagaan Universitas Islam  
 Negeri Ar-Raniry  
 di -  
 Banda Aceh

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3230/Un.08/FAH.I/PP.00.9/1/2026 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Berkenaan dengan Penelitian Ilmiah di Sekretariat DPRK Aceh Tenggara, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Lingkungan Sekretariat DPRK Aceh Tenggara kepada :

Nama : **Wulandari**  
 NPM : 220501005  
 Fakultas : Adab dan Humaniora  
 Judul : Dominasi Marga Dalam Ruang Publik Di Kabupaten Aceh  
 Penelitian : Tenggara

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DPRK ACEH TENGGARA



**MUHAMMAD HATTA, SE**  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
 NIP. 198003062006041003

## LAMPIRAN IV

( Surat Balasan II )



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN**

فمرنتاه كيوفتين اچيه نغارا سكرناربات ديوان فراكيلن ركيات كيوفتين  
 Jln. Jend. Ahmad Yani No. Telp. (0629) 522892 - 21015 Fax. (0629) 21015 E-mail : sekretariatdprkagara20@gmail.com

KUTACANE 24651

Nomor	: 35 /Set-DPRK/III/ 2026	Kutacane, 11 Maret 2026
Lampiran	: 1 (satu) Eks	Kepada Yth :
Hal	: Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
		di -
		Banda Aceh

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3230/Un.08/FAH.I/PP.00.9/1/2026 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Berkenaan dengan Penelitian Ilmiah di Sekretariat DPRK Aceh Tenggara, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Lingkungan Sekretariat DPRK Aceh Tenggara kepada :

Nama	: Wulandari
NPM	: 220501005
Fakultas	: Adab dan Humaniora
Judul	: Dominasi Marga Dalam Ruang Publik Di Kabupaten Aceh Tenggara
Penelitian	: Tenggara

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DPRK ACEH TENGGARA



MUHAMMAD HATTA, SE  
 PEMBINA WAKIL MUDA (IV/c)  
 N.P. 198003062006041003

## Lampiran V

( Surat Balasan III )



**MAJELIS ADAT ACEH**  
 مجلس عادة اچيه  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
 Jl. Kutacane-Blangkejeren Kota Kutacane

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 224/ 27 / M /2026

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh Nomor : 3230/Un.08/FAH.I/PP.00.0/1/2026, hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa tertanggal 22 Januari 2026, maka Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Wulandari  
 NIM : 220501005  
 Program Studi/Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam  
 Jenjang : S-1

Benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 23 s/d 25 Februari 2026 dengan judul "**Dominasi Marga Dalam Ruang Publik di Kabupaten Aceh Tenggara.**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kutacane, 26 Februari 2026  
 Ketua Majelis Adat Aceh  
 Kabupaten Aceh Tenggara

  
 Kasri Selian

## LAMPIRAN VI

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Suhardi Pelis  
 Jabatan : Kepala Bid Hasanah Adat Aceh Tenggara  
 Usia : 58 Tahun  
 Desa : Muhajirin
2. Nama : Hasanudin Beruh  
 Jabatan : Bidang Hasanah Adat  
 Umur : 65 Tahun  
 Desa : Terutung Payung Gabung
3. Nama : Kaidan Selian  
 Jabatan : Anggota MAA  
 Umur : 62 Tahun  
 Desa : Mendabe
4. Nama : M. Sardi Pelis  
 Jabatan : Anggota MAA  
 Umur : 54 Tahun  
 Desa : Simpang 4
5. Nama : Sanadi Pinim  
 Jabatan : Anggota MAA  
 Umur : 44 Tahun  
 Desa : Payemunje
6. Nama : Jaini Anwar S. Psi  
 Jabatan : Pegawai DPRD  
 Umur : 46 Tahun  
 Desa : Batu Mbulan Asli
7. Nama : Suprianto S.E  
 Jabatan : ASN  
 Alamat : Pelonas Baru
8. Nama : Munampak Sibarani, S.E  
 Jabatan : Anggota DPRK  
 Umur : 50 Tahun
9. Nama : Gerlam Pandingan, S.Pd., M. Si.  
 Jabatan : Anggota DPRK  
 Umur : 53 Tahun
10. Nama : Hamzah  
 Pekerjaan : Petani  
 Umur : 55 Tahun

- Desa : Lawe Pasaran Tengku Mbelin
11. Nama : Suhendra Yahdi
- Perkerjaan : Guru
- Umur : 39 Tahun
- Desa : Kuta Lang Lang Baru
12. Nama : Mhd. Zulhadli
- Perkerjaan : Guru
- Umur : 35 Tahun
- Desa : Lawe Pasaran Tengku Mbelin



## LAMPIRAN VII

### PERTANYAAN WAWANCARA

#### 1. Tokoh Adat Suku Alas

- 1) Bagaimana peran marga dalam struktur adat dan kehidupan sosial masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara?
- 2) Apakah marga tertentu memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan adat dan sosial? Mengapa?
- 3) Bagaimana hubungan antara sistem adat marga dengan praktik politik dan pemerintahan modern?
- 4) Menurut Anda, apakah dominasi marga berdampak pada keharmonisan antar-marga dalam masyarakat?
- 5) Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap masa depan peran marga dalam ruang publik di Aceh Tenggara?

#### 2. Pemimpin Marga (Marga Desky dan Pinim)

- 1) Bagaimana sejarah dan posisi marga Desky/Pinim dalam struktur sosial masyarakat Alas?
- 2) Menurut Anda, faktor apa yang membuat marga tertentu memiliki pengaruh kuat dalam politik dan ruang publik?
- 3) Bagaimana peran jaringan kekerabatan marga dalam mobilisasi dukungan politik?
- 4) Apakah dominasi marga dianggap sebagai tradisi, strategi politik, atau kebutuhan sosial?

- 5) Bagaimana sikap marga Desky/Pinim terhadap marga lain dalam distribusi jabatan dan akses ruang publik?

### **3. Pejabat Pemkab Aceh Tenggara**

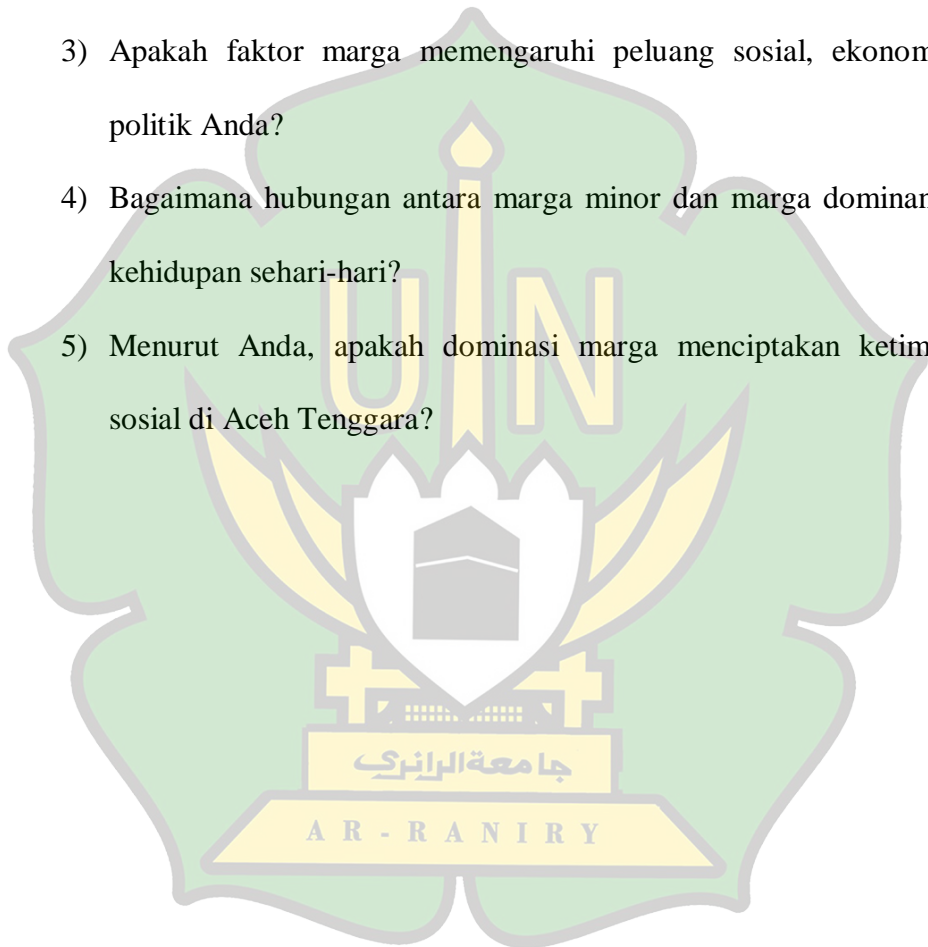
- 1) Apakah faktor marga memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan selama Anda menjabat?
- 2) Bagaimana peran marga dalam proses pemilihan kepala daerah dan pembentukan pemerintahan?
- 3) Apakah terdapat tekanan atau dukungan dari marga tertentu dalam kebijakan pemerintahan?
- 4) Bagaimana Anda melihat pengaruh dominasi marga terhadap kualitas demokrasi lokal di Aceh Tenggara?
- 5) Menurut Anda, apakah dominasi marga berdampak pada pemerataan pembangunan daerah?

### **4. Anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara**

- 1) Bagaimana peran marga dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota DPRD?
- 2) Apakah marga memengaruhi pola dukungan politik di masyarakat?
- 3) Bagaimana distribusi jabatan politik di DPRD dilihat dari latar belakang marga?
- 4) Apakah dominasi marga memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik?
- 5) Bagaimana pandangan Anda tentang keadilan representasi marga dalam lembaga legislatif?

## 5. Warga Masyarakat dari Marga Minor

- 1) Bagaimana pengalaman Anda sebagai anggota marga minor dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh Tenggara?
- 2) Apakah Anda merasa memiliki akses yang sama dalam ruang publik dibandingkan marga dominan?
- 3) Apakah faktor marga memengaruhi peluang sosial, ekonomi, atau politik Anda?
- 4) Bagaimana hubungan antara marga minor dan marga dominan dalam kehidupan sehari-hari?
- 5) Menurut Anda, apakah dominasi marga menciptakan ketimpangan sosial di Aceh Tenggara?



**LAMPIRAN VIII****DOKUMENTASI PENULIS DENGAN INFORMAN**

Foto 1.1  
Wawancara dengan Tokoh Adat MAA di Kabupaten Aceh Tenggara



Foto 1.2  
Wawancara dengan DPRK ( Fraksi PAN Komisi B )  
Dan (DPRK Fraksi Silayakh Komisi A ) di Kabupaten Aceh Tenggara



Foto 1.3  
Wawancara dengan Suprianto ASN Pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Aceh Tenggara



Foto 1.4  
Wawancara dengan Bapak Jaini Anwar.  
Selaku Pegawai di Sekretariat DPRK Aceh Tenggara



Foto 1.5  
Wawancara dengan Bapak Hamzah  
Selaku Petani di Kabupaten Aceh Tenggara



Foto 1. 6  
Wawancara dengan Bapak Mhd. Zulfhadli  
dan Bapak Suhendra Yahdi Selaku Guru di Kabupaten Aceh Tenggara

## LAMPIRAN IX

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Identitas

- a. Nama Lengkap : Wulandari
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Lawe Pasaran, 07 Agustus 2004
- c. Jenis Kelaminan : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Alas
- f. Status Perkawinan : Belum Menikah
- g. Pekerjaan : Mahasiswa
- h. Alamat : Lawe Pasaran Tengku Mbelin, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara

#### Nama Orangtua/Wali

- a. Bapak : Ahmad
- b. Ibu : Suriati
- c. Pekerjaan : Petani/IRT
- d. Alamat : Lawe Pasaran Tengku Mbelin, Kec. Lawe Sumur, Kab. Aceh Tenggara

#### Daftar Pendidikan

- a. SD : MIN Lawe Sumur
- b. SLPT : MTSN 1 Aceh Tenggara
- c. SLPTA : MAN 1 Aceh Tenggara
- d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar hidup ini penulis membuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 13 Mei 2026

Penulis

**WULANDARI**